



DATA STRATEGIS BPS

ISBN : 978-979-064-085-6

Katalog BPS: 1103003

Nomor Publikasi: 03200.0901

Ukuran Buku: 15 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: vi + 110

Naskah:

Direktorat Neraca Produksi

Direktorat Neraca Pengeluaran

Direktorat Statistik Harga

Direktorat Statistik Distribusi

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Penyunting:

Direktorat Diseminasi Statistik

Penata Letak:

Direktorat Diseminasi Statistik

Gambar Kulit Oleh:

Direktorat Diseminasi Statistik

Penerbit :

Badan Pusat Statistik

Dicetak Oleh:

CV. Nasional Indah

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumber nya

KATA PENGANTAR



Pada era informasi saat ini, data telah menjadi kebutuhan pokok berbagai pihak. Tidak ada kegiatan perencanaan, pengendalian, maupun evaluasi tanpa menggunakan data.

Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung-jawab atas perstatistikan di Indonesia. Oleh karena itu penyediaan data makro sebagai hasil dari kegiatan statistik merupakan tanggung jawab BPS sesuai tuntutan perundang-undangan.

Dari sekian banyak data yang disajikan BPS, terdapat beberapa data yang diseminasinya ditunggu berbagai pihak, di antaranya oleh pemerintah, akademisi, pebisnis, bahkan masyarakat umum. BPS menyebut data yang ditunggu tersebut sebagai *Data Strategis* yang terdiri atas pertumbuhan ekonomi, inflasi, ekspor-impor, statistik kemiskinan, ketenagakerjaan, dan produksi pangan.

Dalam rangka memperingati hari Ulang Tahun ke-64 Republik Indonesia, BPS kembali mempersembahkan sebuah publikasi yang berjudul *Data Strategis BPS* kepada seluruh lapisan pengguna data sebagai sumbangsih BPS untuk kemajuan bangsa.

Karena spektrum pengguna sangat luas, maka setiap data pada buku ini diberi penjelasan praktis dan dilengkapi dengan konsep/definisi baku yang disajikan pada bagian akhir buku.

Sebuah upaya awal, merupakan usaha yang terbaik dari lembaga ini, walaupun demikian mungkin belum memenuhi harapan sebagian besar pengguna. Oleh karenanya, kritik dan saran penyempurnaan sangat diharapkan.

Semoga buku ini bermanfaat.

Jakarta, Agustus 2009
Kepala Badan Pusat Statistik,

Rusman Heriawan



<http://www.bps.go.id>



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Pendahuluan	1
Pertumbuhan Ekonomi	5
Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2009 :	
Semester I	8
Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2009: Semester I	10
Pertumbuhan PDB Menurut Penggunaan Tahun 2005-2009: Semester I .	11
Struktur PDB Menurut Penggunaan Tahun 2005-2009: Semester I	13
PDB dan Produk Nasional Bruto (PNB) Per Kapita Tahun 2005-2008	14
Angka Inflasi	15
Inflasi Nasional Menurut Kelompok Pengeluaran	19
Statistik Ekspor Impor	23
Statistik Kemiskinan	35
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia, 1996–2009	38
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2008–Maret 2009	39
Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2008–Maret 2009	41
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	42
Perbandingan Angka Kemiskinan BPS dan Bank Dunia	43
Rangkuman	47
Statistik Ketenagakerjaan	49
Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Angka	
Pengangguran	52
Lapangan Pekerjaan Utama	54
Status Pekerjaan Utama	55
Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran Menurut Provinsi	56
Angka Produksi Tanaman Pangan	59
Angka Tetap Produksi Padi Tahun 2008	61

Angka Ramalan II Produksi Padi Tahun 2009	62
Pola Panen Padi Tahun 2007–2009	63
Angka Tetap Produksi Jagung Tahun 2008	65
Angka Ramalan II Produksi Jagung Tahun 2009	65
Pola Panen Jagung Tahun 2007–2009	66
Angka Tetap Produksi Kedelai Tahun 2008	68
Angka Ramalan II Produksi Kedelai Tahun 2009	69
Pola Panen Kedelai Tahun 2007–2009	70
Penjelasan Teknis Statistik	73
Produk Domestik Bruto (PDB)	75
Inflasi	85
Ekspor–Impor Barang	90
Kemiskinan	94
Ketenagakerjaan	96
Angka Produksi Tanaman Pangan	102
Daftar Singkatan dan Akronim	107



Pendahuluan



<http://www.bps.go.id>



PENDAHULUAN

Buku ini berisi data strategis yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS), disertai penjelasan praktis. Kriteria strategis pada data yang dimaksud paling tidak mencakup pengertian tidak ada institusi lain yang menyusun data tersebut, banyak digunakan untuk berbagai kajian, menggambarkan fenomena dan bahkan mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi, dan kemunculannya dinantikan berbagai pihak.

Data strategis yang dihasilkan BPS mencakup: pertumbuhan ekonomi, inflasi, ekspor-impor, statistik kemiskinan, ketenagakerjaan, dan ramalan produksi padi dan palawija.

Spektrum pengguna data strategis sangat lebar, mulai dari pemerintah, akademisi, pebisnis, kalangan internasional, hingga masyarakat umum. Lebarnya spektrum pengguna sejalan dengan sifat alamiah data yang memiliki dimensi yang sangat luas. Data dasar mulai dari jumlah penduduk, konsumsi per kapita, nilai tambah sektoral, dan berujung pada, misalnya Produk Domestik Bruto (PDB). Data harga dan perubahannya berujung pada angka inflasi. Data perekonomian internasional mencakup ekspor-impor dan data kepariwisataan. Data produksi primer di antaranya padi, jagung, dan hortikultura. Kondisi ketenagakerjaan seperti angkatan kerja, pengangguran, status berusaha, dan lapangan usaha utama disajikan dalam data ketenagakerjaan. Sesuai pengalaman empiris BPS, data strategis seperti kriteria yang telah disebutkan mencakup: pertumbuhan ekonomi, inflasi, ekspor-impor, statistik kemiskinan, ketenagakerjaan, dan ramalan produksi padi dan palawija. Data strategis inilah yang akan disajikan dalam buku ini.

Agar buku ini bisa memenuhi harapan pengguna, pada setiap data yang disajikan diberi penjelasan praktis. Bagi yang ingin membaca penjelasan lebih rinci, dapat memperolehnya pada bagian penjelasan teknis statistik. Bagian ini memberikan informasi yang lengkap tetapi ringkas kepada pembaca tentang konsep definisi, metodologi, pengumpulan data, referensi, dan diseminasi data.

Karena penjelasan yang diberikan bersifat praktis, maka buku ini merupakan media sosialisasi produk statistik BPS bagi para pengambil kebijakan di kalangan pemerintah, legislator, akademisi, peneliti, dan mahasiswa sebagai wujud untuk menjamin hak masyarakat memperoleh informasi publik. Dengan semakin terpenuhinya kebutuhan masyarakat pengguna data, mereka

Pendahuluan

selanjutnya diharapkan dengan penuh kesadaran, memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan perstatistikan BPS.

Setelah Bab Pendahuluan, pembaca dapat mencermati data terkini tentang PDB. Data ini menggambarkan kinerja ekonomi dari sisi besarnya, dan derivasi data ini dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi sektoral, tingkat peningkatan harga barang/jasa secara keseluruhan, dan masih ada kemungkinan lain tentang kegunaannya.

Pada Bab III pembaca dapat memanfaatkan data inflasi yang merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah, pelaku bisnis, kalangan perbankan, anggota parlemen, bahkan masyarakat umum berkepentingan terhadap data tersebut.

Selanjutnya dalam Bab IV disajikan data statistik ekspor-impor untuk memberikan informasi mengenai kinerja perdagangan internasional, baik dari sisi volume maupun nilai. Pada bab ini juga disajikan rincian komoditi, negara asal dan tujuan, serta pelabuhannya.

Bab V mengantarkan pembaca untuk dapat mencermati data strategis tentang angka kemiskinan. Masalah tersebut merupakan salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah negara manapun, karena salah satu tugas pemerintah adalah menyejahterakan masyarakat. Ketersediaan data kemiskinan yang akurat merupakan aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangannya.

Bab VI menyediakan data ketenagakerjaan yang mencakup angkatan kerja, pengangguran, lapangan usaha, dan distribusi per provinsi di Indonesia. Beberapa indikator juga disajikan, seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dengan memperhatikan jadwal survei tenaga kerja di Indonesia, maka data yang disajikan mencakup kondisi terakhir hingga Februari 2009.

Dalam Bab VII, pembaca dapat mencermati penyajian angka ramalan produksi padi dan palawija. Selain memperlihatkan pola panen, data yang disajikan juga mencakup luasan panen, produksi, dan produktivitas tanaman pangan mulai dari tahun 2007 hingga tahun 2009. Data ini dapat digunakan untuk bahan perencanaan dan kebijakan yang terkait dengan ketahanan pangan nasional.



Pertumbuhan Ekonomi

2



<http://www.bps.go.id>



PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah sama dengan pertumbuhan PDB. Apabila diibaratkan "kue", PDB adalah besarnya kue tersebut. Pertumbuhan ekonomi sama dengan membesarnya "kue" tersebut yang pengukurannya merupakan persentase pertambahan PDB pada tahun tertentu terhadap PDB tahun sebelumnya.¹

PDB disajikan dalam dua konsep harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan; dan penghitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan konsep harga konstan dengan tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga. Saat ini BPS menggunakan tahun dasar 2000.

Nilai tambah juga merupakan balas jasa faktor produksi--tenaga kerja, tanah, modal, dan *entrepreneurship*--yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDB hanya mempertimbangkan domestik, yang tidak mempedulikan kepemilikan faktor produksi.

Konsep dan definisi secara lebih lengkap disajikan dalam penjelasan teknis statistik. Berikut ini diuraikan data PDB dengan berbagai turunannya.

¹ Secara rumus pertumbuhan ekonomi adalah:

$$PE = \left(\frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \right) * 100\%$$

PE = pertumbuhan ekonomi;
PDB = Produk Domestik Bruto;
t = tahun tertentu;
t-1 = tahun sebelumnya.

I. Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005–2009: Semester I

Ekonomi Indonesia selama tahun 2005-2008 mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 5,7 persen (2005), 5,5 persen (2006), 6,3 persen (2007) dan 6,1 persen (2008) dibanding tahun sebelumnya. Sementara pada semester I tahun 2009 bila dibandingkan dengan semester II tahun 2008 tumbuh sebesar 1,0 persen dan bila dibandingkan dengan semester I tahun 2008 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 4,2 persen. Angka-angka tersebut diperoleh dari penerapan rumus di atas ke dalam besaran PDB tahun 2005-2008 serta semester I tahun 2009 atas dasar harga konstan 2000 (Tabel 2.1 dan Tabel 2.2).

Sektor pengangkutan-komunikasi selama tahun 2005-2008 selalu mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 12,8 persen (2005), 14,2 persen (2006), 14,0 persen (2007), dan 16,7 persen (2008). Namun demikian pada sektor pengangkutan-komunikasi tersebut kontribusinya terhadap total pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 0,8 persen (2005), 0,9 persen (2006), 1,0 persen (2007), dan 1,2 persen (2008). Kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2005 yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,4, sektor industri pengolahan sebesar 1,3 persen (2006), sektor industri perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,4 persen (2007), dan sektor perdagangan-hotel-restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1,2 persen (2008).

Pada semester I tahun 2009 ternyata sumber pertumbuhan terbesar juga terjadi pada sektor pengangkutan-komunikasi sebesar 1,3 persen dari total pertumbuhan yang sebesar 4,2 persen. Sementara pada sektor industri pengolahan hanya memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 0,4 persen walaupun pertumbuhannya (*y-on-y*) sebesar 1,5 persen (Tabel 2.2).

Sektor pengangkutan-komunikasi selama tahun 2005-2008 selalu mengalami pertumbuhan tertinggi.

Tabel 2.1
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2005–2008 (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan				Sumber Pertumbuhan			
	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	2,7	3,4	3,4	4,8	0,4	0,5	0,5	0,7
2. Pertambangan dan Penggalian	3,2	1,7	2,0	0,5	0,3	0,2	0,2	0,0
3. Industri Pengolahan	4,6	4,6	4,7	3,7	1,3	1,3	1,3	1,0
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	6,3	5,8	10,3	10,9	0,0	0,0	0,1	0,1
5. Konstruksi	7,5	8,3	8,6	7,3	0,4	0,5	0,5	0,5
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,3	6,4	8,4	7,2	1,4	1,1	1,4	1,2
7. Pengangkutan dan Komunikasi	12,8	14,2	14,0	16,7	0,8	0,9	1,0	1,2
8. Keuangan, Real estat dan Jasa Perusahaan	6,7	5,5	8,0	8,2	0,6	0,5	0,7	0,8
9. Jasa-jasa	5,2	6,2	6,6	6,4	0,5	0,5	0,6	0,6
PDB	5,7	5,5	6,3	6,1	5,7	5,5	6,3	6,1
PDB Tanpa Migas	6,6	6,1	6,9	6,5	-	-	-	-

Tabel 2.2
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha
Semester I Tahun 2009 (persen)

Lapangan Usaha	Semester I 2009	Semester I 2009	Sumber
	Terhadap Semester II 2008	Terhadap Semester I 2008	Pertumbuhan y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	6,0	3,8	0,5
2. Pertambangan dan Penggalian	0,1	2,3	0,2
3. Industri Pengolahan	-1,0	1,5	0,4
4. Listrik Gas dan Air Bersih	7,8	13,7	0,1
5. Konstruksi	0,9	6,3	0,4
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	-4,8	0,2	0,0
7. Pengangkutan dan Komunikasi	7,4	17,3	1,3
8. Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	2,1	5,8	0,6
9. Jasa-jasa	3,8	7,1	0,7
PDB	1,0	4,2	4,2
PDB Tanpa Migas	1,2	4,6	

Tabel 2.3
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000
Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2005–2009: Semester I (triliun rupiah)

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku					Atas Dasar Harga Konstan 2000				
	2005	2006	2007	2008	Smt I 2009	2005	2006	2007	2008	Smt I 2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	364,2	433,2	541,6	713,3	417,0	253,9	262,4	271,4	284,3	149,1
2. Pertambangan dan Penggalian	309,0	366,5	441,0	543,4	238,2	165,2	168,0	171,4	172,3	87,2
3. Industri Pengolahan	760,4	919,5	1 068,7	1 380,7	718,1	491,6	514,1	538,1	557,8	279,5
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	26,7	30,4	34,7	40,8	23,3	11,6	12,3	13,5	15,0	8,3
5. Konstruksi	195,1	251,1	305,2	419,3	263,6	103,6	112,2	121,9	130,8	67,7
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	431,6	501,5	589,4	692,1	355,9	293,7	312,5	338,8	363,3	177,4
7. Pengangkutan dan Komunikasi	180,6	231,5	264,3	312,5	171,2	109,2	124,8	142,3	166,1	93,1
8. Keuangan, Real estat dan Jasa Perusahaan	230,5	269,1	305,2	368,1	198,4	161,2	170,1	183,7	198,8	103,3
9. Jasa-jasa	276,2	336,3	399,3	483,8	281,5	160,8	170,7	182,0	193,7	102,1
PDB	2 774,3	3 339,2	3 949,3	4 954,0	2 667,2	1 750,8	1 847,1	1 963,1	2 082,1	1 067,7
PDB Tanpa Migas	2 458,2	2 967,0	3 532,8	4 426,4	2 471,0	1 605,3	1 703,4	1 820,5	1 939,2	997,4

PDB atas dasar harga konstan tahun 2000 pada tahun 2005 mencapai Rp1.750,8 triliun rupiah dan pada tahun 2008 meningkat menjadi sebesar Rp2.082,1 triliun rupiah. Sementara pada semester I tahun 2009 PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp1.067,7 triliun rupiah. Berdasarkan harga berlaku, tahun 2005 sebesar Rp2.774,3 triliun rupiah dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai Rp4.954,0 triliun rupiah pada tahun 2008 sementara pada semester I tahun 2009 nilainya sebesar Rp2.667,2 triliun rupiah (Tabel 2.3).

2. Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005–2009: Semester I

Distribusi PDB menurut sektor atau lapangan usaha atas dasar harga berlaku menunjukkan peran sektor-sektor ekonomi pada tahun tersebut. Tiga sektor utama: sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan mempunyai peran lebih dari separuh dari total perekonomian yaitu sebesar 56,1 persen pada tahun 2005, 55,5 persen (2006), 55,7 persen (2007) dan 56,3 persen (2008) serta 55,9 persen pada semester I tahun 2009.

Distribusi PDB menurut sektor atau lapangan usaha atas dasar harga berlaku menunjukkan peran sektor-sektor ekonomi pada tahun tersebut.

Pada tahun 2008 sektor industri pengolahan memberi kontribusi terhadap total perekonomian sebesar 27,9 persen, sektor pertanian 14,4 persen, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran 14,0 persen; sementara pada semester I tahun 2009 urutan komposisinya berubah yaitu sektor industri pengolahan sebesar 26,9 persen, sektor pertanian 15,6 persen, dan sektor perdagangan-hotel-restoran 13,4 persen (Tabel 2.4).

Tabel 2.4
Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005–2009: Semester I
(persen)

Lapangan Usaha	2005	2006	2007	2008	Smt I 2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	13,1	13,0	13,7	14,4	15,6
2. Pertambangan dan Pengalihan	11,1	11,0	11,2	11,0	8,9
3. Industri Pengolahan	27,4	27,5	27,1	27,9	26,9
4. Listrik Gas dan Air Bersih	1,0	0,9	0,9	0,8	0,9
5. Konstruksi	7,0	7,5	7,7	8,4	9,9
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	15,6	15,0	14,9	14,0	13,4
7. Pengangkutan dan Komunikasi	6,5	6,9	6,7	6,3	6,4
8. Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	8,3	8,1	7,7	7,4	7,4
9. Jasa-jasa	10,0	10,1	10,1	9,8	10,6
PDB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
PDB Tanpa Migas	88,6	88,9	89,5	89,3	92,6

3. Pertumbuhan PDB Menurut Penggunaan Tahun 2005–2009: Semester I

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 2005 hingga semester I tahun 2009 selalu terjadi pertumbuhan positif di semua komponen PDB penggunaan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 2005 hingga semester I tahun 2009 selalu terjadi pertumbuhan positif di semua komponen PDB penggunaan, baik pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik serta ekspor neto barang dan jasa.

Pada tahun 2008, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,3 persen, konsumsi pemerintah sebesar 10,4 persen, pembentukan modal tetap bruto sebesar 11,7 persen, serta ekspor maupun impor barang dan jasa, masing-masing sebesar 9,5 persen dan 10,0 persen (Tabel 2.5).

Tabel 2.5
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Penggunaan
Tahun 2005–2008 (persen)

Komponen Penggunaan	Laju Pertumbuhan				Sumber Pertumbuhan			
	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,0	3,2	5,0	5,3	2,4	1,9	2,9	3,1
2. Konsumsi Pemerintah	6,6	9,6	3,9	10,4	0,5	0,7	0,3	0,8
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,9	2,6	9,4	11,7	2,3	0,6	2,1	2,6
4. Ekspor	16,6	9,4	8,5	9,5	6,8	4,3	4,0	4,6
5. <i>Dikurangi</i> : Impor	17,8	8,6	9,0	10,0	5,8	3,1	3,4	3,9
Produk Domestik Bruto	5,7	5,5	6,3	6,1	5,7	5,5	6,3	6,1

Pertumbuhan ekonomi sampai dengan semester I tahun 2009 juga menunjukkan peningkatan. Pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2009 terhadap semester I tahun 2008 (*y-on-y*) meningkat sebesar 4,2 persen. Peningkatan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto masing-masing sebesar 18,0 persen, 5,4 persen dan 3,0 persen. Sumber pertumbuhan terbesar semester I tahun 2009 berasal komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,1 persen (Tabel 2.6).

Sumber pertumbuhan terbesar semester I tahun 2009 berasal komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,1 persen.

Tabel 2.6
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Penggunaan
Semester I Tahun 2009 (persen)

Jenis Penggunaan	Semester I 2009 Terhadap Semester II 2008	Semester I 2009 Terhadap Semester I 2008	Sumber Pertumbuhan <i>y-on-y</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,9	5,4	3,1
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-11,2	18,0	1,3
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	-3,9	3,0	0,7
4. Ekspor Barang dan Jasa	-16,1	-17,2	-8,7
5. <i>Dikurangi</i> Impor Barang dan Jasa	-22,7	-24,9	-10,3
PDB	1,0	4,2	4,2

Tabel 2.7
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000
Menurut Penggunaan Tahun 2005–2009: Semester I
(triliun rupiah)

Jenis Penggunaan	Atas Dasar Harga Berlaku					Atas Dasar Harga Konstan 2000				
	2005	2006	2007	2008	Smt I 2009	2005	2006	2007	2008	Smt I 2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1 785,6	2 092,7	2 510,5	3 019,5	1 617,1	1 043,8	1 076,9	1 130,8	1 191,2	617,0
2. Konsumsi Pemerintah	225,0	288,1	329,8	416,9	235,7	134,6	147,6	153,3	169,3	85,8
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	655,9	805,8	986,2	1 369,6	827,3	393,5	403,7	441,6	493,2	245,2
4. a. Perubahan Inventori	40,0	42,4	-1,1	7,7	-0,1	33,5	29,0	-0,2	3,9	-0,7
b. Diskrepansi Statistik	-47,2	-70,4	-35,8	84,1	-92,9	-8,5	16,2	52,0	25,5	7,6
5. Ekspor	945,1	1 036,3	1 163,0	1 474,5	630,8	793,6	868,3	942,4	1 031,9	430,0
6. Dikurangi: Impor	830,1	855,6	1 003,3	1 418,1	550,5	639,7	694,6	756,9	832,8	317,1
Produk Domestik Bruto	2 774,3	3 339,2	3 949,3	4 954,0	2 667,2	1 750,8	1 847,1	1 963,1	2 082,1	1 067,7

Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 sebesar Rp1.785,6 triliun meningkat menjadi Rp3.019,5 triliun (2008). Demikian pula atas dasar harga konstan, pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat dari Rp1.043,8 triliun (2005) menjadi sebesar Rp1.191,2 triliun (2008). Sementara besaran nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga pada semester I tahun 2009 atas dasar harga berlaku sebesar Rp1.617,1 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar Rp617,0 triliun (Tabel 2.7).

4. Struktur PDB Menurut Penggunaan Tahun 2005–2009: Semester I

Konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang terbesar dalam penggunaan PDB Indonesia.

Dilihat dari distribusi PDB penggunaan, konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar dalam penggunaan PDB Indonesia; yaitu sebesar 64,4 persen (2005), 62,7 persen (2006), 63,6 persen (2007) dan 60,9 persen (2008). Komponen penggunaan lainnya yang cukup berperan yaitu pembentukan modal tetap bruto dan ekspor barang dan jasa. Pada semester I tahun 2009 peranan pembentukan tetap bruto meningkat lebih tinggi dibandingkan tahun 2008, yaitu dari 27,6 persen menjadi 31,0 persen (Tabel 2.8).

Tabel 2.8
Struktur PDB Menurut Penggunaan Tahun 2005–2009: Semester I
(persen)

Komponen Penggunaan	2005	2006	2007	2008	Smt I 2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	64.4	62.7	63.6	60.9	60.6
2. Konsumsi Pemerintah	8.1	8.6	8.3	8.4	8.8
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	23.6	24.1	25.0	27.6	31.0
4. a. Perubahan Inventori	1.4	1.3	0.0	0.2	-0.0
b. Diskrepansi Statistik	-1.7	-2.1	-0.9	1.7	-3.5
5. Ekspor Barang dan Jasa	34.1	31.0	29.4	29.8	23.7
6. Dikurangi: Impor Barang dan Jasa	29.9	25.6	25.4	28.6	20.6
PDB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

5. PDB dan Produk Nasional Bruto (PNB) Per Kapita
Tahun 2005–2008

PDB/PNB per kapita adalah PDB/PNB (atas dasar harga berlaku) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Selama tahun 2005-2008 PDB per kapita terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2005 sebesar Rp12,6 juta (US\$1.311,7), tahun 2006 sebesar Rp15,0 juta (US\$1.658,4), tahun 2007 sebesar Rp17,5 juta (US\$1.937,4), dan tahun 2008 sebesar Rp21,7 juta (US\$2.271,2). Sementara itu, PNB per kapita juga terus meningkat selama tahun 2005-2008 dengan peningkatan berkisar 16,9–24,6 persen setiap tahunnya. PNB per kapita pada tahun 2005 sebesar Rp12,0 juta (US\$1.247,8) meningkat menjadi Rp20,9 juta (US\$2.190,5) pada tahun 2008 (Tabel 2.9).

PNB per kapita terus meningkat selama tahun 2005-2008 dengan peningkatan berkisar 16,9–24,6 persen setiap tahunnya.

Tabel 2.9
PDB dan PNB Per Kapita Indonesia Tahun 2005–2008

Uraian	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PDB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku				
• Nilai (juta rupiah)	12,6	15,0	17,5	21,7
• Indeks Peningkatan (persen)	18,9	18,8	16,8	23,9
• Nilai (US\$)	1 311,7	1 658,4	1 937,4	2 271,2
PNB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku				
• Nilai (juta rupiah)	12,0	14,4	16,8	20,9
• Indeks Peningkatan (persen)	18,6	19,6	16,9	24,6
• Nilai (US\$)	1 247,8	1 587,7	1 857,7	2 190,5





<http://www.bps.go.id>



ANGKA INFLASI

Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga.

Makna inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang yang harganya naik dan ada yang tetap. Namun, tidak jarang ada barang/jasa yang harganya justru turun. *Resultante* (rata-rata tertimbang) dari perubahan harga bermacam barang dan jasa tersebut, pada suatu selang waktu (bulanan) disebut inflasi (apabila naik) dan deflasi (apabila turun).

Secara umum, hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer Price Index (CPI)*. Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi. Inflasi/deflasi tersebut dapat dihitung menggunakan suatu rumus.²

Tujuan penyusunan inflasi adalah untuk memperoleh indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga. Tujuan tersebut penting dicapai karena indikator tersebut dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi mikro atau makro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian nilai pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap.

Pada tingkat korporasi angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Dalam lingkup yang lebih luas (makro) angka inflasi menggambarkan kondisi/

²Rumus:

$$INF_t = \left(\frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \right) \times 100$$

INF = inflasi (atau deflasi) pada waktu (bulan atau tahun) t ;
IHK = Indeks Harga Konsumen;

Angka Inflasi

stabilitas moneter dan perekonomian. Secara spesifik kegunaan angka inflasi antara lain untuk:

- Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (*wage-indexation*),
- Penyesuaian nilai kontrak (*contractual payment*),
- Eskalasi nilai proyek (*project escalation*),
- Penentuan target inflasi (*inflation targeting*),
- Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*budget indexation*),
- Sebagai pembagi PDB, PDRB (*GDP deflator*),
- Sebagai proksi perubahan biaya hidup (*proxy of cost of living*),
- Indikator dini tingkat bunga, valas, dan indeks harga saham.

Tabel 3.1
Inflasi Nasional, 2006–2009
(2002=100)

Bulan	IHK				Inflasi			
	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Januari	138,72	147,41	158,26	113,78 ^{*)}	1,36	1,04	1,77	-0,07 ^{*)}
Februari	139,53	148,32	159,29	114,02 ^{*)}	0,58	0,62	0,65	0,21 ^{*)}
Maret	139,57	148,67	160,81	114,27 ^{*)}	0,03	0,24	0,95	0,22 ^{*)}
April	139,64	148,43	161,73	113,92 ^{*)}	0,05	-0,16	0,57	-0,31 ^{*)}
Mei	140,16	148,58	164,01	113,97 ^{*)}	0,37	0,10	1,41	0,04 ^{*)}
Juni	140,79	148,92	110,08 ^{*)}	114,10 ^{*)}	0,45	0,23	2,46 ^{*)}	0,11 ^{*)}
Juli	141,42	149,99	111,59 ^{*)}	114,61 ^{*)}	0,45	0,72	1,37 ^{*)}	0,45 ^{*)}
Agustus	141,88	151,11	112,16 ^{*)}		0,33	0,75	0,51 ^{*)}	
September	142,42	152,32	113,25 ^{*)}		0,38	0,80	0,97 ^{*)}	
Oktober	143,65	153,53	113,76 ^{*)}		0,86	0,79	0,45 ^{*)}	
November	144,14	153,81	113,90 ^{*)}		0,34	0,18	0,12 ^{*)}	
Desember	145,89	155,50	113,86 ^{*)}		1,21	1,10	-0,04 ^{*)}	

^{*)} Tahun dasar 2007 (2007=100)

Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 66 kota³, pada bulan Juli 2009 terjadi inflasi 0,45 persen, atau terjadi kenaikan IHK dari 114,10 pada bulan Juni 2009 menjadi 114,61 pada bulan Juli 2009. Dengan menggunakan rumus tersebut, diperoleh inflasi Juli 2009 sebesar $((114,61 - 114,10) / 114,10) \times 100\% = 0,45\%$.

³ Sampai dengan Mei 2008, pemantauan data harga dilakukan di 45 kota.

Laju inflasi tahun kalender 2009 sebesar 0,66 persen (IHK Juli 2009 dibandingkan IHK Desember 2008), sedangkan laju inflasi *year on year* (IHK Juli 2009 terhadap IHK Juli 2008) adalah 2,71 persen. Secara periodik, IHK dan inflasi dari bulan Januari 2006 sampai dengan Juli 2009 disajikan pada Tabel 3.1.

Laju inflasi tahun kalender (Januari-Juli) 2009 sebesar 0,66 persen.

Laju inflasi tahun kalender (Januari-Juli) 2008 adalah sebesar 8,85 persen, sedangkan pada selang waktu yang sama tahun 2009 sebesar 0,66 persen (Tabel 3.2).

Tabel 3.2
Perbandingan Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, Year on Year, 2007–2009

Inflasi	2007	2008 (2007=100)	2009 (2007=100)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Juli	0,72	1,37	0,45
2. Januari – Juli (Tahun Kalender)	2,81	8,85	0,66
3. Juli terhadap Juli (<i>year on year</i>) (tahun n) (tahun n-1)	6,06	11,90	2,71

Inflasi Nasional Menurut Kelompok Pengeluaran

Barang dan jasa dalam IHK dikelompokkan menjadi tujuh kelompok pengeluaran. Besarnya inflasi pada bulan Juli 2009 untuk masing-masing kelompok tersebut adalah: kelompok bahan makanan (1,14 persen), kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (0,29 persen), kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar (0,08 persen), kelompok sandang (-0,23 persen), kelompok kesehatan (0,13 persen), kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga (1,21 persen), dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan (0,28 persen).

Inflasi *year on year* (IHK Juli 2009 terhadap IHK Juli 2008) sebesar 2,71 persen. Secara rinci, IHK dan inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Inflasi Nasional Juli 2009 Menurut Kelompok Pengeluaran
(2007 = 100)

Kelompok Pengeluaran	IHK			Inflasi Bulan Juli 2009 *)	Laju Inflasi Tahun Kalender 2009 **)	Inflasi Tahun ke Tahun ***)
	Juli 2008	Desember 2008	Juli 2009			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
U m u m	111,59	113,86	114,61	0,45	0,66	2,71
1 Bahan Makanan	118,59	122,70	123,68	1,14	0,80	4,29
2 Makanan Jadi, minuman, Rokok dan Tembakau	110,55	114,98	119,48	0,29	3,91	8,08
3 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan bakar	109,97	113,02	113,88	0,08	0,76	3,56
4 Sandang	109,49	112,27	114,84	-0,23	2,29	4,89
5 Kesehatan	106,95	109,13	111,99	0,13	2,62	4,71
6 Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	106,82	109,84	111,66	1,21	1,66	4,53
7 Transpor dan Komunikasi dan Jasa Keuangan	110,28	107,26	102,88	0,28	-4,08	-6,71

*) Persentase perubahan IHK bulan Juli 2009 terhadap IHK bulan sebelumnya.

**) Persentase perubahan IHK bulan Juli 2009 terhadap IHK bulan Desember 2008

***) Persentase perubahan IHK bulan Juli 2009 terhadap IHK bulan Juli 2008

Tabel 3.4
Andil Inflasi Nasional Kelompok Pengeluaran Juli 2009 (persen)

Kelompok Pengeluaran	Andil Inflasi (%)
(1)	(2)
U M U M	0,45
1. Bahan Makanan	0,26
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	0,06
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	0,02
4. Sandang	-0,01
5. Kesehatan	0,00
6. Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	0,08
7. Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	0,04

Pada bulan Juli 2009 kelompok bahan makanan memberikan andil inflasi terbesar yaitu sebesar 0,26 persen.

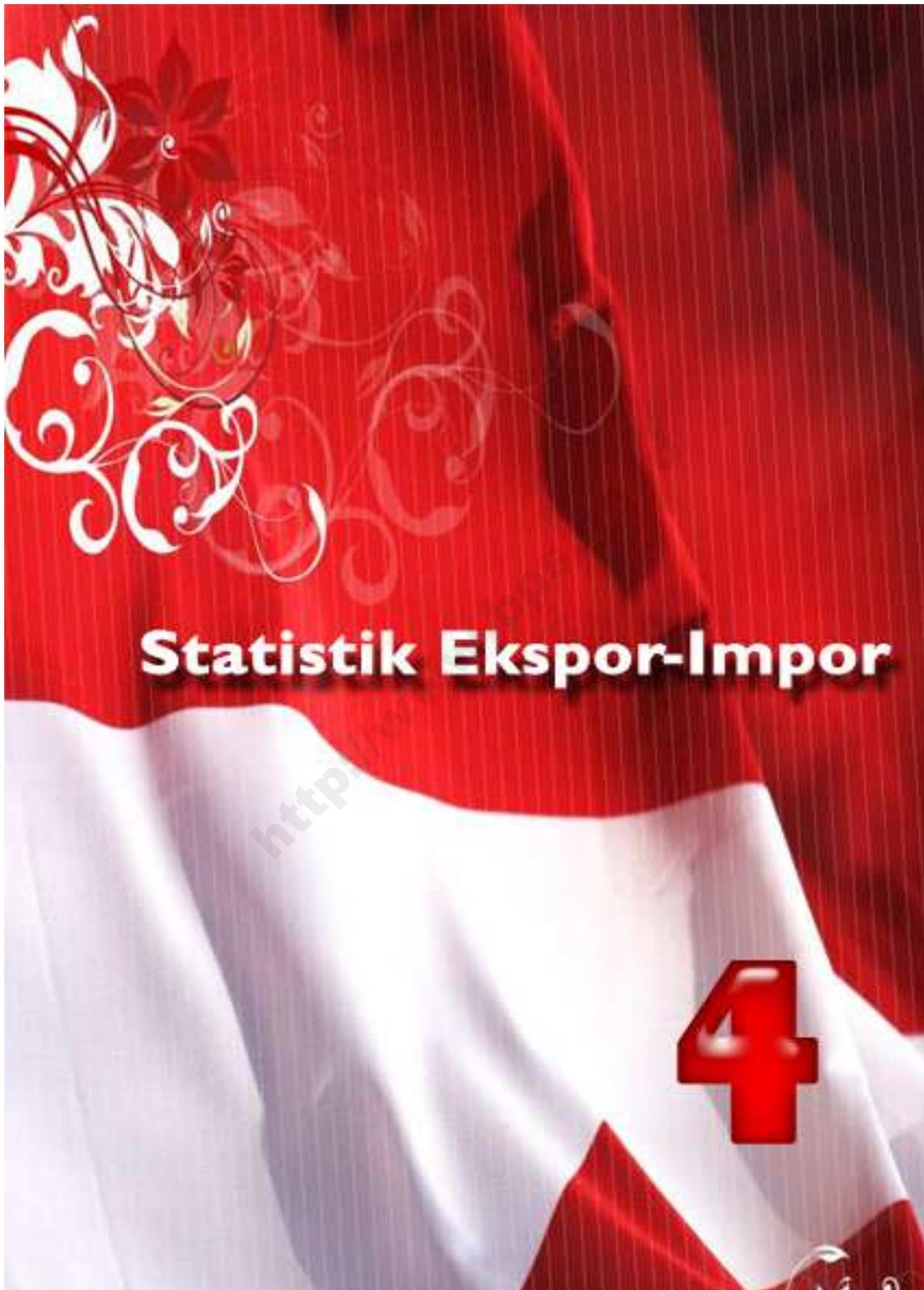
Pada bulan Juli 2009 andil inflasi menurut kelompok pengeluaran adalah sebagai berikut: kelompok bahan makanan sebesar 0,26 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,06 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,02 persen, kelompok sandang - 0,01 persen, kelompok kesehatan 0,00 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,08 persen; dan kelompok transpor, komunikasi & jasa keuangan 0,04 persen (Tabel 3.4).

<http://www.bps.go.id>



<http://www.bps.go.id>





Statistik Ekspor-Impor

4



<http://www.bps.go.id>



STATISTIK EKSPOR-IMPOR BARANG

BPS secara periodik menyajikan data statistik ekspor-impor barang (*tradable goods*). Data tersebut disusun dengan memanfaatkan dokumen pemberitahuan ekspor/impor barang yang diperoleh dari Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). Data ini termasuk kategori data yang mempunyai tenggang waktu (*time lag*) cukup singkat antara pengumpulan dan diseminasinya, yaitu hanya 2 (dua) bulan.

Pencatatan sejak Januari 2008 menggunakan sistem perdagangan umum (*general trade*) karena barang yang masuk Kawasan Berikat dicatat sebagai impor.

Data ekspor-impor disajikan untuk memberikan informasi mengenai kinerja perdagangan luar negeri Indonesia. Data yang disajikan mencakup volume maupun nilai, termasuk data yang dirinci menurut komoditi (jenis barang dan kelompok barang), negara tujuan/asal negara, dan pelabuhan muat/bongkar barang.

Bagi pemerintah, statistik ekspor-impor berguna dalam merumuskan kebijakan dan memantau kinerja perekonomian. Di samping itu, statistik tersebut dipakai pula dalam penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Neraca Pembayaran (*Balance of Payment/BOP*). Bagi swasta dan akademisi, statistik tersebut dapat dipakai untuk berbagai analisis dalam penelitian ekonomi dan sosial.

Pencatatan data ekspor-impor dilakukan oleh BPS sesuai rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nations Statistical Division (UNSD). Berdasarkan rekomendasi tersebut, BPS mengambil wilayah pabean (*the custom frontier*) sebagai wilayah statistik. Wilayah pabean ini dipilih karena sumber datanya berupa dokumen ekspor-impor yang harus melalui penyelesaian pabean (*customs declaration*). Metode pengumpulan data tersebut juga dilakukan oleh negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara ASEAN, kecuali Kamboja yang pengumpulan datanya dilakukan langsung melalui survei ke perusahaan eksportir dan importir.

Statistik ekspor-impor berguna dalam merumuskan kebijakan dan memantau kinerja perekonomian, penyusunan PDB, dan Neraca Pembayaran.

Sesuai dengan kepentingan dalam spektrum pengguna, data tersebut disajikan dalam berbagai bentuk.

- a. Impor menurut komoditi yang dikodifikasi dengan *Harmonized System (HS)* dengan digitasi dari 1, 2, sampai dengan 10 digit. Selain kodifikasi tersebut, digunakan juga *the Standard International Trade Classification (SITC)* dengan digitasi dari 1, 2, dan 3 digit serta data impor menurut penggunaan barang.
- b. Ekspor-Impor menurut negara tujuan/asal.
- c. Ekspor-Impor menurut pelabuhan muat/bongkar.
- d. Ekspor-Impor menurut komoditi dan negara tujuan/asal.
- e. Ekspor-Impor menurut komoditi dan pelabuhan muat/bongkar.
- f. Ekspor-Impor menurut provinsi dan komoditi.

Menurut status penyajian, data ekspor-impor bulanan dikategorikan menjadi dua.

- a. Angka sementara dirilis sekitar **satu bulan** setelah akhir bulan pencatatan dan diterbitkan setiap bulan. Contoh: data bulan Juli akan dirilis pada bulan September pada tahun yang sama.
- b. Angka tetap disajikan **dua bulan** setelah akhir bulan pencatatan. Contoh: data bulan Juli akan dirilis pada bulan Oktober pada tahun yang sama.

Data ekspor-impor bulanan dikategorikan menjadi dua, yaitu angka sementara dan angka tetap.

Sedangkan data ekspor-impor tahunan dapat diperoleh dalam waktu **tiga bulan** setelah akhir tahun pencatatan. Angka ekspor tahun 2008 dapat diperoleh pada bulan Maret 2009.

Di bawah ini disajikan data statistik ekspor-impor pokok yang merupakan salah satu data strategis yang dirilis oleh BPS.

Tabel 4.1.a
Perkembangan Ekspor Indonesia, Januari–Juni 2009

Uraian	Nilai FOB (Juta US\$)				% Perubahan Juni 2009 thd Mei 2009	% Perubahan Jan-Jun 2009 thd 2008	% Peran thd Total Ekspor Jan-Jun 2009
	Mei 2009	Juni 2009	Jan-Jun 2008	Jan-Jun 2009			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Ekspor	9 208,8	9 330,1	70 396,4	50 022,0	1,32	-28,94	100,00
Migas	1 136,7	1 452,8	16 093,8	7 175,1	27,81	-55,42	14,34
• Minyak Mentah	525,0	660,8	7 448,5	3 272,3	25,86	-56,07	6,55
• Hasil Minyak	136,5	188,3	1 765,9	871,8	37,99	-50,63	1,73
• Gas	475,2	603,7	6 879,4	3 031,0	27,04	-55,94	6,06
Nonmigas	8 072,1	7 877,3	54 302,6	42 846,9	-2,41	-21,10	85,66

Total ekspor periode Januari-Juni 2009 mengalami penurunan sebesar 28,94 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2008.

Pada Juni 2009 terjadi peningkatan nilai ekspor bila dibandingkan Mei 2009 sebesar 1,32 persen (Tabel 4.1.a). Peningkatan nilai ekspor tersebut terjadi karena naiknya ekspor barang-barang migas sebesar 27,81 persen. Nilai ekspor secara total untuk periode Januari hingga Juni 2009 sebesar US\$50.022,0 juta yang terdiri dari ekspor migas US\$7.175,1 juta dan ekspor nonmigas US\$42.846,9 juta. Jika dibandingkan dengan periode Januari-Juni tahun 2008 maka terjadi penurunan sebesar 28,94 persen untuk ekspor total. Ekspor migas secara kumulatif (Januari-Juni 2009) turun 55,42 persen, sementara ekspor nonmigas turun 21,10 persen.

Tabel 4.1.b
Perkembangan Impor Indonesia, Januari–Juni 2009*)

Uraian	Nilai CIF (juta US\$)		Perubahan Juni 2009*) thd Mei 2009		Nilai CIF (juta US\$)		%Peran thd Total Impor Semester I 2009*)
	Mei 2009	Juni 2009*)	(Juta US\$)	(%)	Semester I 2008	Semester I 2009*)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Impor	7 641,3	7 953,4	312,1	4,08	65 149,0	41 395,2	100,00
Migas	1 560,1	1 441,5	-118,6	-7,60	16 847,4	7 409,9	17,90
1. Minyak Mentah	701,6	624,0	-77,6	-11,06	5 572,5	2 837,6	6,86
2. Hasil Minyak	822,5	801,3	-21,2	-2,58	11 234,3	4 281,4	10,34
3. Gas	36,0	16,2	-19,8	-55,00	40,6	290,9	0,70
Nonmigas	6 081,2	6 511,9	430,7	7,08	48 301,6	33 985,3	82,10

Keterangan : *)Angka Sementara

Dari Tabel 4.1.b. dapat dikemukakan bahwa nilai impor Indonesia selama Juni 2009 mengalami kenaikan 4,08 persen dibanding impor Mei 2009, yaitu dari US\$7.641,3 juta menjadi US\$7.953,4 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan impor nonmigas sebesar US\$430,7 juta (7,08 persen), sedangkan impor migas menurun sebesar US\$118,6 juta atau 7,60 persen. Lebih lanjut penurunan impor migas disebabkan oleh menurunnya impor minyak mentah dan hasil minyak masing-masing sebesar US\$77,6 juta (11,06 persen) dan US\$21,2 juta (2,58 persen), serta gas sebesar US\$19,8 juta (55,00 persen).

Nilai impor Indonesia selama Juni 2009 mengalami kenaikan 4,08 persen dibanding impor Mei 2009.

Secara runtun, nilai ekspor-impor migas dan nonmigas dari Juni 2008 sampai dengan Juni 2009 ditampilkan berturut-turut pada tabel 4.2.a dan tabel 4.2.b. Data sampai dengan Mei 2009 merupakan angka tetap, sedangkan untuk bulan Juni 2009 masih merupakan angka sementara.

Tabel 4.2.a
Perkembangan Nilai Ekspor Juni 2008–Juni 2009

Bulan	Nilai FOB (juta US\$)			Persentase Perubahan Terhadap Periode Sebelumnya		
	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008						
Juni	2 995,0	9 823,4	12 818,4	-7,15	1,43	-0,71
Juli	2 882,6	9 645,3	12 527,9	-3,75	-1,81	-2,27
Agustus	2 956,3	9 510,5	12 466,8	2,56	-1,40	-0,49
September	2 455,5	9 821,7	12 277,2	-16,94	3,27	-1,52
Oktober	1 885,5	8 904,4	10 789,9	-23,21	-9,34	-12,11
November	1 445,5	8 220,2	9 665,7	-23,34	-7,68	-10,42
Desember	1 407,0	7 489,5	8 896,5	-2,66	-8,89	-7,96
Jan-Des	29 126,3	107 894,1	137 020,4	31,86	17,26	20,09
2009						
Januari	1 025,5	6 254,6	7 280,1	-27,11	-16,49	-18,17
Februari	1 024,4	6 109,9	7 134,3	-0,11	-2,31	-2,00
Maret	1 281,6	7 333,1	8 614,7	25,11	20,02	20,75
April	1 254,0	7 200,0	8 454,0	-2,15	-1,82	-1,87
Mei	1 136,7	8 072,1	9 208,8	-9,35	12,11	8,93
Juni ^{a)}	1 452,8	7 877,3	9 330,1	27,81	-2,41	1,32

Keterangan : ^{a)} Angka Sementara

Tabel 4.2.b
Perkembangan Nilai Impor Juni 2008–Juni 2009

Tahun	Bulan	Nilai CIF (Juta US\$)			Persentase Perubahan terhadap Periode Sebelumnya		
		Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2008	Juni	3 685,9	8 424,6	12 110,5	11,18	0,91	3,83
	Juli	3 639,1	9 230,7	12 869,8	-1,27	9,57	6,27
	Agustus	3 177,1	9 149,1	12 326,2	-12,70	-0,88	-4,22
	September	2 539,1	8 803,7	11 342,8	-20,08	-3,78	-7,98
	Oktober	1 977,7	8 754,8	10 732,5	-22,11	-0,56	-5,38
	Nopember	1 358,0	7 723,3	9 081,3	-31,33	-11,78	-15,39
	Desember	1 014,4	6 681,2	7 695,6	-25,30	-13,49	-15,26
	Jan-Des		30 552,9	98 644,4	129 197,3	-	-
2009	Januari	1 281,5	5 319,1	6 600,6	26,33	-20,39	-14,23
	Februari	964,4	4 974,6	5 939,0	-24,74	-6,48	-10,02
	Maret	930,1	5 624,0	6 554,1	-3,56	13,05	10,36
	April	1 232,3	5 474,5	6 706,8	32,49	-2,66	2,33
	Mei	1 560,1	6 081,2	7 641,3	26,60	11,08	13,93
	Juni*)	1 441,5	6 511,9	7 953,4	-7,60	7,08	4,08

Keterangan : *) Angka Sementara

Tabel 4.3.a
Ekspor Nonmigas Sepuluh Golongan Barang Utama HS 2 Dijit Januari–Juni 2009

Golongan Barang (HS)	Nilai FOB (juta US\$)				Perubahan Juni 2009 thd Mei 2009 (juta US\$)	% Peran thd Total Nonmigas Jan-Jun 2009
	Mei 2009	Juni 2009	Jan-Jun 2008	Jan-Jun 2009		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Bahan bakar mineral (27)	1 023,5	913,4	4 513,4	5 367,5	-110,1	12,53
2. Lemak & minyak hewan/nabati (15)	1 219,5	745,7	9 168,4	4 837,6	-473,8	11,29
3. Mesin/peralatan listrik (85)	669,3	662,1	3 813,7	3 497,3	-7,2	8,16
4. Bijih, kerak, dan abu logam (26)	510,3	526,8	2 147,1	2 282,1	16,5	5,33
5. Mesin-mesin/pesawat mekanik (84)	409,9	389,5	2 357,8	2 180,8	-20,4	5,09
6. Karet dan barang dari karet (40)	390,1	384,8	3 904,3	2 052,0	-5,3	4,79
7. Pakaian jadi bukan rajutan(62)	267,3	294,7	1 719,1	1 602,9	27,4	3,74
8. Kertas/karton (48)	272,8	303,0	1 908,8	1 596,4	30,2	3,72
9. Barang-barang rajutan (61)	216,6	237,7	1 231,8	1 202,7	21,1	2,81
10. Kayu, barang dari kayu (44)	187,7	198,0	1 489,8	1 067,9	10,3	2,49
Total 10 Golongan Barang	5 167,0	4 655,7	32 254,2	25 687,2	-511,3	59,95
Lainnya	2 905,1	3 221,6	22 048,4	17 159,7	316,5	40,05
Total Ekspor Nonmigas	8 072,1	7 877,3	54 302,6	42 846,9	-194,8	100,00

Statistik Ekspor-Impor

Penurunan terbesar ekspor nonmigas Juni 2009 terhadap Mei 2009 terjadi pada lemak & minyak hewani/nabati (HS 15) sebesar US\$473,8 juta sedangkan peningkatan terbesar pada kertas/karton (HS 48) sebesar US\$30,2 juta.

Selama Januari-Juni 2009, ekspor dari 10 golongan barang (HS 2 digit) memberikan kontribusi 59,95 persen terhadap total ekspor nonmigas. Dari sisi pertumbuhan, ekspor 10 golongan barang tersebut menurun 20,36 persen terhadap periode yang sama tahun 2008. Sementara itu, peranan ekspor nonmigas di luar 10 golongan barang pada Januari-Juni 2009 sebesar 40,05 persen. Secara rinci, nilai ekspor sepuluh golongan barang utama dapat dilihat pada Tabel 4.3.a.

Selama Januari-Juni 2009, ekspor 10 golongan barang menurun 20,36 persen terhadap periode yang sama tahun 2008.

Tabel 4.3.b
Impor Nonmigas Sepuluh Golongan Barang Utama HS 2 Digit
Januari-Juni 2009

Golongan Barang (HS)	Nilai CIF (Juta US\$)					% Peran thd Impor Nonmigas Semester I 2009 ^{a)}
	Mei 2009	Juni 2009 ^{a)}	Perubahan Juni'09 ^{a)} thd Mei'09	Semester I 2008	Semester I 2009 ^{a)}	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Mesin/pesawat mekanik (84)	1 103,0	1 238,4	135,4	8 701,8	6 864,0	20,20
2. Mesin dan peralatan listrik (85)	867,9	893,6	25,7	7 095,5	4 900,3	14,42
3. Bahan kimia organik (29)	339,1	336,4	-2,7	2 616,3	1 716,6	5,05
4. Besi dan baja (72)	285,7	326,0	40,3	4 338,7	1 655,4	4,87
5. Pesawat udara dan bagiannya (88)	522,8	128,9	-393,9	588,2	1 482,6	4,36
6. Barang dari besi dan baja (73)	207,8	235,4	27,6	1 553,1	1 430,9	4,21
7. Plastik dan barang dari plastik (39)	245,5	271,8	26,3	1 986,5	1 336,1	3,93
8. Kendaraan bermotor dan bagiannya (87)	203,7	266,1	62,4	2 932,7	1 260,4	3,71
9. Kapas (52)	136,1	130,7	-5,4	1 064,2	695,2	2,04
10. Sisa industri makanan (23)	126,0	171,5	45,5	878,7	678,8	2,00
Total 10 Golongan Barang Utama	4 037,6	3 998,8	-38,8	31 755,7	22 020,3	64,79
Barang Lainnya	2 043,6	2 513,1	469,5	16 545,9	11 965,0	35,21
Total Impor Nonmigas	6 081,2	6 511,9	430,7	48 301,6	33 985,3	100,00

Keterangan: ^{a)}Angka Sementara

Dari sepuluh golongan barang utama impor nonmigas Indonesia, tiga golongan barang mengalami penurunan pada Juni 2009 dibanding Mei 2009 yaitu pesawat udara dan bagiannya sebesar US\$393,9 juta (75,34 persen), kapas sebesar US\$5,4 juta (3,97 persen), dan bahan kimia organik sebesar US\$2,7 juta (0,80 persen). Sementara itu, tujuh golongan barang lainnya mengalami peningkatan.

Dari tujuh golongan barang yang mengalami peningkatan, satu golongan barang meningkat di atas US\$100,0 juta yaitu *mesin/pesawat mekanik* sebesar US\$135,4 juta (12,28 persen). Sementara itu, satu golongan barang meningkat antara US\$50,0 juta sampai US\$100,0 juta yaitu *kendaraan bermotor dan bagiannya* meningkat sebesar US\$62,4 juta atau 30,63 persen. Lima golongan barang lainnya meningkat di bawah US\$50,0 juta yaitu *sisa industri makanan* sebesar US\$45,5 juta (36,11 persen), *besi dan baja* sebesar US\$40,3 juta (14,11 persen), *barang dari besi dan baja* sebesar US\$27,6 juta (13,28 persen), *plastik dan barang dari plastik* sebesar US\$26,3 juta (10,71 persen), dan *mesin dan peralatan listrik* sebesar US\$25,7 juta (2,96 persen). Secara rinci nilai impor sepuluh golongan barang utama dapat dilihat pada Tabel 4.3.b.

Tabel 4.4.a
Ekspor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Asal Barang Utama
Semester I 2009

Negara Asal	Nilai FOB (Juta US\$)				Perubahan Juni 2009 thd Mei 2009 (Juta US\$)	% Peran thd Total Nonmigas Jan-Jun 2009
	Mei 2009	Juni 2009	Jan-Jun 2008	Jan-Jun 2009		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ASEAN	1 704,3	1 831,0	11 943,5	9 145,6	126,7	21,34
1 Singapura	731,4	778,1	5 098,2	3 958,9	46,7	9,24
2 Malaysia	474,2	444,1	3 138,7	2 251,7	-30,1	5,25
3 Thailand	184,9	207,7	1 595,4	1 031,7	22,8	2,41
ASEAN Lainnya	313,8	401,1	2 111,2	1 903,3	87,3	4,44
UNI EROPA	1 176,1	1 026,3	7 667,1	6 021,8	-149,8	14,06
4 Jerman	166,3	199,0	1 242,4	984,1	32,7	2,30
5 Perancis	79,0	72,4	478,1	409,5	-6,6	0,96
6 Inggris	120,5	124,1	747,0	678,0	3,6	1,58
Uni Eropa Lainnya	810,3	630,8	5 199,6	3 950,2	-179,5	9,22
NEG. UTAMA LAINNYA	3 232,2	3 303,4	21 756,4	17 530,5	71,2	40,91
7 Cina	733,5	727,7	4 373,0	3 735,7	-5,8	8,72
8 Jepang	909,9	1 026,2	6 445,1	5 044,2	116,3	11,77
9 Amerika Serikat	847,8	876,4	6 310,1	4 830,3	28,6	11,27
10 Australia	137,6	129,5	873,3	805,6	-8,1	1,88
11 Korea Selatan	377,2	326,5	2 413,3	1 908,3	-50,7	4,45
12 Taiwan	226,2	217,1	1 341,6	1 206,4	-9,1	2,82
Total 12 Negara Tujuan	4 988,5	5 128,8	34 056,2	26 844,4	140,3	62,65
Lainnya	3 083,6	2 748,5	20 246,4	16 002,5	-335,1	37,35
Total Ekspor Nonmigas	8 072,1	7 877,3	54 302,6	42 846,9	-194,8	100,00

Ekspor nonmigas Indonesia pada Juni 2009 ke Jepang, Amerika Serikat, dan Singapura masing-masing mencapai US\$1.026,2 juta, US\$876,4 juta dan US\$778,1 juta, dengan peranan ketiganya mencapai 34,03 persen.

Penurunan ekspor nonmigas Juni 2009 terjadi ke Korea Selatan turun sebesar US\$50,7 juta diikuti Malaysia sebesar US\$30,1 juta, Taiwan sebesar US\$9,1 juta, Australia sebesar US\$8,1 juta, Perancis sebesar US\$6,6 juta, dan Cina sebesar US\$5,8 juta. Sementara ekspor ke Jepang naik sebesar US\$116,3 juta, Singapura sebesar US\$46,7 juta, Jerman sebesar US\$32,7 juta, Amerika Serikat sebesar US\$28,6 juta, Thailand sebesar US\$22,8 juta, serta Inggris sebesar US\$3,6 juta. Sementara ekspor ke Uni Eropa (27 negara) pada Juni 2009 mencapai US\$1.026,3 juta. Secara keseluruhan, total ekspor ke duabelas negara tujuan utama di atas naik 2,81 persen.

Selama periode Januari-Juni 2009, Jepang masih merupakan negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai US\$5.044,2 juta (11,77 persen), diikuti Amerika Serikat dengan nilai US\$4.830,3 juta (11,27 persen), dan Singapura dengan nilai US\$3.958,9 juta (9,24 persen).

Dari total nilai impor nonmigas Indonesia Juni 2009 sebesar US\$6.511,9 juta, sebesar US\$1.455,7 juta (22,35 persen) berasal dari ASEAN, dan sebesar US\$737,9 juta (11,33 persen) dari Uni Eropa. Berdasarkan negara asal barang utama, impor nonmigas dari Cina merupakan yang terbesar yaitu sebesar US\$1.037,1 juta atau 15,93 persen dari keseluruhan impor nonmigas Indonesia, diikuti Jepang sebesar US\$836,5 juta (12,85 persen), Singapura US\$719,8 juta (11,05 persen), Amerika Serikat sebesar US\$519,2 juta (7,97 persen), Thailand sebesar US\$393,1 juta (6,04 persen), Australia sebesar US\$355,5 juta (5,46 persen), Korea Selatan US\$323,0 juta (4,96 persen), Malaysia sebesar US\$258,3 juta (3,97 persen), Jerman US\$229,2 juta (3,52 persen), Taiwan sebesar US\$163,8 juta (2,52 persen). Selanjutnya impor nonmigas dari Perancis sebesar US\$138,4 juta (2,13 persen) dan Inggris sebesar US\$55,7 juta (0,86 persen). Secara keseluruhan, duabelas negara utama diatas memberikan peran sebesar 77,24 persen dari total impor nonmigas Indonesia.

Penurunan ekspor nonmigas Juni 2009 terhadap Mei 2009 terbesar ke Korea Selatan dan Malaysia.

Total nilai impor nonmigas Indonesia Juni 2009 berasal dari ASEAN (22,35 persen), dan dari Uni Eropa (11,33 persen).

Tabel 4.4.b
Impor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Asal Barang Utama
Semester I 2009*)

Negara Asal	Nilai CIF (Juta US\$)		Peran thd Impor Nonmigas Juni 2009 ^{*)} (%)	Nilai CIF (Juta US\$)		Peran thd Impor Nonmigas Semester I 2009 ^{*)} (%)
	Mei 2009	Juni 2009 ^{*)}		Semester I 2008	Semester I 2009 ^{*)}	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ASEAN	1 300,4	1 455,7	155,3	11 442,8	7 518,3	22,12
1 Singapura	627,0	719,8	92,8	5 663,9	3 843,4	11,31
2 Thailand	354,2	393,1	38,9	3 123,6	1 913,4	5,63
3 Malaysia	237,0	258,3	21,3	1 971,4	1 345,3	3,96
ASEAN Lainnya	82,2	84,5	2,3	683,9	416,2	1,22
UNI EROPA	813,1	737,9	-75,2	4 901,0	4 073,8	11,99
4 Jerman	160,1	229,2	69,1	1 514,6	1 094,8	3,22
5 Perancis	160,6	138,4	-22,2	593,8	700,4	2,06
6 Inggris	74,3	55,7	-18,6	421,4	389,3	1,15
Uni Eropa Lainnya	418,1	314,6	-103,5	2 371,2	1 889,3	5,56
NEG. UTAMA LAINNYA	3 119,5	3 235,1	115,6	23 619,3	17 551,2	51,64
7 Jepang	712,6	836,5	123,9	7 085,6	4 328,8	12,74
8 Cina	1 066,7	1 037,1	-29,6	7 019,6	5 898,8	17,36
9 Amerika Serikat	612,3	519,2	-93,1	3 745,3	3 181,5	9,36
10 Korea Selatan	294,1	323,0	28,9	2 409,8	1 700,0	5,00
11 Australia	278,4	355,5	77,1	1 912,2	1 530,9	4,50
12 Taiwan	155,4	163,8	8,4	1 446,8	911,2	2,68
Total 12 Negara Utama	4 732,7	5 029,6	296,9	36 908,0	26 837,8	78,97
Negara Lainnya	1 348,5	1 482,3	133,8	11 393,6	7 147,5	21,03
Total Impor Nonmigas	6 081,2	6 511,9	430,7	48 301,6	33 985,3	100,00

Keterangan: ^{*)} Angka Sementara

Sementara itu, dari total nilai impor nonmigas Indonesia selama semester I 2009 sebesar US\$33.985,3 juta, 78,97 persen berasal dari duabelas negara utama yaitu Cina sebesar US\$5.898,8 juta atau 17,36 persen, diikuti oleh Jepang sebesar US\$4.328,8 juta (12,74 persen). Berikutnya Singapura berperan 11,31 persen, Amerika Serikat 9,36 persen, Thailand 5,63 persen, Korea Selatan 5,00 persen, Australia 4,50 persen, Malaysia 3,96 persen, Jerman 3,22 persen, Taiwan 2,68 persen, Perancis 2,06 persen, dan Inggris 1,15 persen. Impor Indonesia dari ASEAN mencapai 22,12 persen dan dari Uni Eropa 11,99 persen.



<http://www.bps.go.id>







<http://www.bps.go.id>



KEMISKINAN

Untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan diperlukan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Pengukuran kemiskinan yang terpercaya (*reliable*) dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada perbaikan kondisi hidup orang miskin.

Pengukuran kemiskinan yang dilakukan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut pendekatan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Secara teknis GK dibangun dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari; sedangkan GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

BPS melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pertama kali pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk

miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Kemudian mulai tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Hal ini bisa terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Februari atau Maret. Sebagai informasi tambahan, digunakan pula hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) yang dipakai untuk memperkirakan proporsi pengeluaran masing-masing komoditi pokok non-makanan.

I. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia, 1996–2009

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2009 tampak berfluktuasi dari tahun ke tahun meskipun terlihat adanya kecenderungan menurun pada periode 2000-2005 (Tabel 5.1). Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta (17,47 persen) pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta (23,43 persen) pada tahun 1999.

Pada periode 1999-2002 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 9,57 juta, yaitu dari 47,97 juta (23,43 persen) pada tahun 1999 menjadi 38,40 juta (18,20 persen) pada tahun 2002. Penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi pada periode 2002-2005 sebesar 3,3 juta, yaitu dari 38,40 juta (18,20 persen) pada tahun 2002 menjadi 35,10 juta (15,97 persen) pada tahun 2005. Akan tetapi pada periode 2005-2006 terjadi pertambahan jumlah penduduk miskin sebesar 4,20 juta, yaitu dari 35,10 juta pada tahun 2005 menjadi 39,30 juta pada tahun 2006. Akibatnya persentase penduduk miskin juga meningkat dari 15,97 persen menjadi 17,75 persen.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta (16,58 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2006 yang berjumlah 39,30 juta (17,75 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,13 juta. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin pada Maret 2007 masih lebih tinggi dibandingkan keadaan Februari 2005, di mana persentase penduduk miskin sebesar 15,97 persen.

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2009 berfluktuasi dari tahun ke tahun, meskipun ada kecenderungan menurun pada periode 2000-2005.

Dua tahun berikutnya, jumlah penduduk miskin menurun kembali menjadi 34,96 juta (15,42 persen) pada Maret 2008 dan 32,53 juta (14,15 persen) pada Maret 2009.

Tabel 5.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
Menurut Daerah, 1996–2009

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1996	9,42	24,59	34,01	13,39	19,78	17,47
1998	17,60	31,90	49,50	21,92	25,72	24,23
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2000	12,30	26,40	38,70	14,60	22,38	19,14
2001	8,60	29,30	37,90	9,76	24,84	18,41
2002	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2003	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,68	19,98	15,97
2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75
2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42
2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15

2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2008–Maret 2009

Selama periode Maret 2008–Maret 2009 jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih tajam daripada daerah perkotaan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta orang (14,15 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2008 yang berjumlah 34,96 juta (15,42 persen), berarti jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 2,43 juta. Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih tajam daripada daerah perkotaan. Selama periode Maret 2008–Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,57 juta orang, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang (Tabel 5.2).

Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2008,

sebagian besar (63,47 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan, sementara pada bulan Maret 2009 persentase ini hampir sama yaitu 63,39 persen.

Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2008-Maret 2009 nampaknya berkaitan dengan faktor-faktor berikut:

- a. Selama periode Maret 2008-Maret 2009 inflasi umum relatif stabil yaitu sebesar 7,92 persen.
- b. Rata-rata harga beras nasional (yang merupakan komoditi paling penting bagi penduduk miskin) selama periode Maret 2008-Maret 2009 tumbuh sebesar 7,80 persen, lebih rendah dari laju inflasi umum.
- c. Rata-rata upah riil harian buruh tani (70 persen penduduk miskin perdesaan bekerja di sektor pertanian) naik 13,22 persen dan rata-rata upah riil harian buruh bangunan naik sebesar 10,61 persen selama periode Maret 2008–Maret 2009.
- d. Selama Subround I (Januari-April) 2009 terjadi panen raya. Produksi padi Subround I 2009 mencapai 29,49 juta ton GKG (hasil Angka Ramalan II 2009), naik sekitar 4,87 persen dari produksi padi Subround I 2008 yang sebesar 28,12 juta ton GKG.
- e. Pada umumnya penduduk miskin bekerja di subsektor pertanian tanaman pangan dan perikanan (nelayan). NTP di kedua subsektor tersebut selama periode April 2008-Maret 2009 mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,88 persen untuk subsektor tanaman pangan dan 5,27 persen untuk subsektor perikanan (nelayan).
- f. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga triwulan I tahun 2009 (angka sangat-sangat sementara) meningkat sebesar 5,84 persen terhadap triwulan I tahun 2008 (angka sangat sementara).

Pada umumnya penduduk miskin bekerja di subsektor pertanian tanaman pangan dan perikanan (nelayan).

Tabel 5.2
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah, Maret 2008–Maret 2009

Diolah dari data Susenas Panel Maret 2008 dan Maret 2009

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah penduduk miskin (juta)	Persentase penduduk miskin
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
Maret 2008	143 897	60 999	204 896	12,77	11,65
Maret 2009	155 909	66 214	222 123	11,91	10,72
Perdesaan					
Maret 2008	127 207	34 624	161 831	22,19	18,93
Maret 2009	139 331	40 503	179 835	20,62	17,35
Kota+Desa					
Maret 2008	135 270	47 366	182 636	34,96	15,42
Maret 2009	147 339	52 923	200 262	32,53	14,15

3. Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2008–Maret 2009

Selama Maret 2008-Maret 2009, Garis Kemiskinan naik dari Rp182.636 per kapita per bulan menjadi Rp200.262 per kapita per bulan.

Selama Maret 2008-Maret 2009, Garis Kemiskinan naik sebesar 9,65 persen, yaitu dari Rp182.636 per kapita per bulan pada Maret 2008 menjadi Rp200.262 per kapita per bulan pada Maret 2009 (Tabel 5.2). Dengan memerhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan Maret 2008 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 74,07 persen, sementara pada bulan Maret 2009 peranannya hanya turun sedikit menjadi 73,57 persen.

Komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada bulan Maret 2009, sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan sebesar 25,06 persen di perkotaan dan 34,67 persen di perdesaan. Selain beras, barang-barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh cukup besar terhadap

Garis Kemiskinan adalah gula pasir (2,83 persen di perkotaan, 3,72 persen di perdesaan), telur (3,61 persen di perkotaan, 2,68 persen di perdesaan), mie instan (3,21 persen di perkotaan, 2,70 persen di perdesaan), tempe (2,47 persen di perkotaan, 2,09 persen di perdesaan), dan tahu (2,24 persen di perkotaan, 1,60 persen di perdesaan).

Untuk komoditi non-makanan, biaya perumahan mempunyai peranan yang cukup besar terhadap Garis Kemiskinan yaitu 7,58 persen di perkotaan dan 5,73 persen di perdesaan. Biaya non-makanan lainnya yang memberi sumbangan cukup besar terhadap Garis Kemiskinan adalah pengeluaran untuk listrik (3,08 persen di perkotaan, 1,81 persen di perdesaan), angkutan (2,85 persen di perkotaan, 1,34 persen di perdesaan) dan minyak tanah (1,73 persen di perkotaan, 0,70 persen di perdesaan).

4. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada periode Maret 2008-Maret 2009, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 2,77 pada keadaan Maret 2008 menjadi 2,50 pada keadaan Maret 2009. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,76 menjadi 0,68 pada periode yang sama (Tabel 5.3). Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan jauh lebih tinggi dari pada perkotaan. Pada bulan Maret 2009, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 1,91

*Pada periode
Maret 2008-
Maret 2009,
Indeks
Kedalaman
Kemiskinan (P1)
dan Indeks
Keparahan
Kemiskinan (P2)
menunjukkan
kecenderungan
menurun.*

sementara di daerah perdesaan mencapai 3,05. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,52 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,82. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah daripada daerah perkotaan.

Tabel 5.3
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia Menurut Daerah
Maret 2008–Maret 2009

Diolah dari data Susenas Panel Maret 2008 dan Maret 2009

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2008	2,07	3,42	2,77
Maret 2009	1,91	3,05	2,50
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
Maret 2008	0,56	0,95	0,76
Maret 2009	0,52	0,82	0,68

5. Perbandingan Angka Kemiskinan BPS dan Bank Dunia

Bank Dunia menghitung garis kemiskinan dengan menggunakan pengeluaran konsumsi yang dikonversi ke dalam US\$ PPP (Purchasing Power Parity/ Paritas Daya Beli)

Untuk membandingkan angka kemiskinan antar negara, Bank Dunia menghitung garis kemiskinan dengan menggunakan pengeluaran konsumsi yang dikonversi ke dalam US\$ PPP (*Purchasing Power Parity/ Paritas Daya Beli*), bukan nilai tukar US\$ resmi. Angka konversi PPP menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa di mana jumlah yang sama tersebut dapat dibeli seharga US\$1 di Amerika. Angka konversi ini dihitung berdasarkan harga dan kuantitas di masing-masing negara yang dikumpulkan dalam suatu survei yang biasanya dilakukan setiap lima tahun sekali.

Chen dan Ravallion (2001) membuat suatu penyesuaian angka kemiskinan dunia dengan menggunakan garis kemiskinan US\$1 PPP per orang per hari. Berdasarkan penghitungan yang

mereka lakukan, pada tahun 1993 garis kemiskinan US\$1 PPP per orang per hari adalah ekuivalen dengan Rp20.811 per orang per bulan. Garis kemiskinan PPP disesuaikan dari waktu ke waktu dengan angka inflasi yang menggunakan Indeks Harga Konsumen. Pada tahun 2006 garis kemiskinan US\$1 PPP ekuivalen dengan Rp97.218 per orang per bulan dan garis kemiskinan US\$2 PPP ekuivalen dengan Rp194.439 per orang per bulan. Perbandingan garis kemiskinan dan persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2006 menurut BPS dan Bank Dunia adalah sebagai berikut:

Garis kemiskinan PPP disesuaikan dari waktu ke waktu dengan angka inflasi yang menggunakan Indeks Harga Konsumen

Tabel 5.4
Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, 2006

Sumber	Garis Kemiskinan per Hari	Garis Kemiskinan per Bulan	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
BPS	Rp 5.066,57 US\$1.55 PPP	Rp151.997	17,8
Bank Dunia	US\$1 PPP Rp3.240,60	Rp97.218	7,4
	US\$2 PPP Rp6.481,30	Rp194.439	49,0

Sumber: *Making the New Indonesia Work for the Poor, the World Bank (2006)* dan BPS

Perbandingan jumlah dan persentase penduduk miskin berdasarkan perhitungan BPS dan Bank Dunia tahun 1996-2009 dapat dilihat pada Tabel 5.5, Gambar 5.1 dan 5.2.

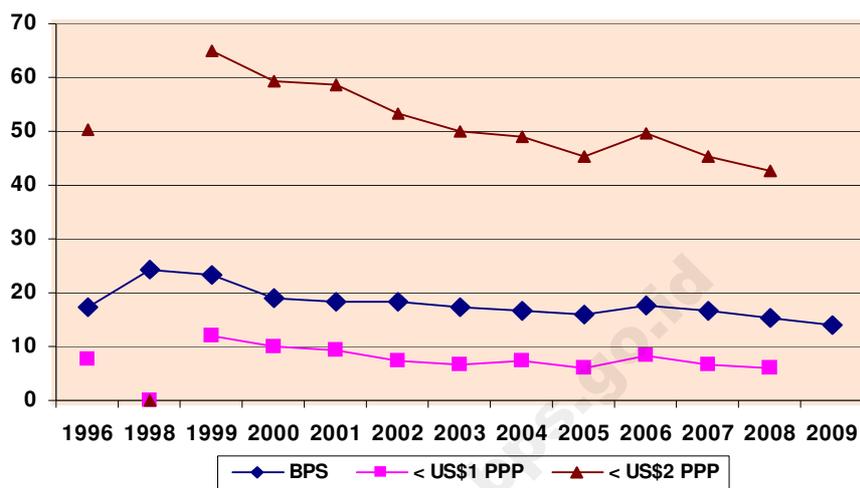
Tabel 5.5
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
Menurut Perhitungan BPS dan Bank Dunia, 1996–2009

Tahun	BPS		Bank Dunia			
	Penduduk Miskin		Penduduk Miskin di Bawah US\$1 PPP		Penduduk Miskin di Bawah US\$2 PPP	
	Jumlah (juta)	Persentase	Jumlah (juta)	Persentase	Jumlah (juta)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1996	34,01	17,47	15,40	7,80	99,60	50,50
1998	49,50	24,23	-	-	-	-
1999	47,97	23,43	24,90	12,00	135,00	65,10
2000	38,70	19,14	20,90	9,90	125,30	59,50
2001	37,90	18,41	19,70	9,20	125,20	58,70
2002	38,40	18,20	15,50	7,20	115,60	53,50
2003	37,30	17,42	14,50	6,60	110,00	50,10
2004	36,10	16,66	16,50	7,40	109,10	49,00
2005	35,10	15,97	13,60	6,00	102,10	45,20
2006	39,30	17,75	19,50	8,50	113,80	49,60
2007	37,17	16,58	15,50	6,70	105,30	45,20
2008	34,96	15,42	14,00	5,90	100,70	42,60
2009	32,53	14,15	-	-	-	-

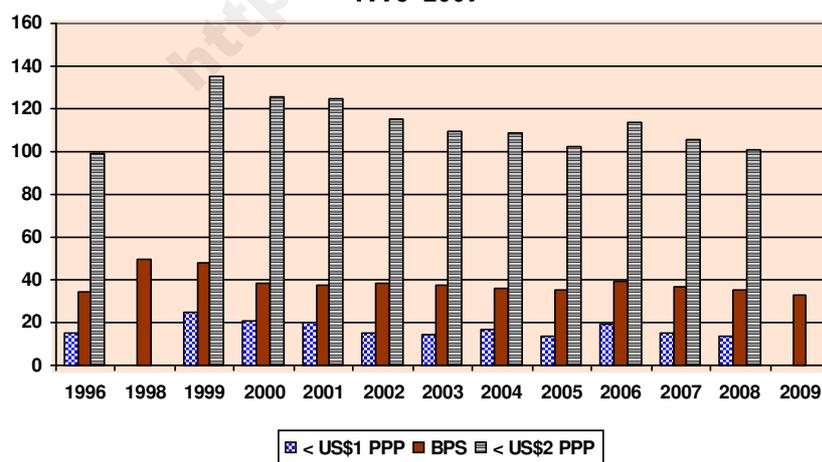
Selain Indonesia, banyak negara yang juga mengeluarkan data kemiskinan versi pemerintah dan data kemiskinan versi Bank Dunia. Terlihat bahwa data resmi kemiskinan yang dikeluarkan suatu negara pada umumnya terletak diantara dua versi data yang dikeluarkan Bank Dunia. Untuk Cina dan India, data resmi kemiskinannya lebih rendah dari data kemiskinan Bank Dunia untuk kriteria US\$ 1 PPP.

Selain Indonesia, banyak negara yang juga mengeluarkan data kemiskinan versi negara masing-masing. Pada Gambar 5.3 disajikan contoh perbandingan data kemiskinan resmi yang dikeluarkan pemerintah dan data kemiskinan versi Bank Dunia. Terlihat bahwa data resmi kemiskinan yang dikeluarkan suatu negara pada umumnya terletak diantara dua versi data yang dikeluarkan Bank Dunia. Untuk Cina dan India, data resmi kemiskinannya lebih rendah dari data kemiskinan Bank Dunia untuk kriteria US\$ 1 PPP.

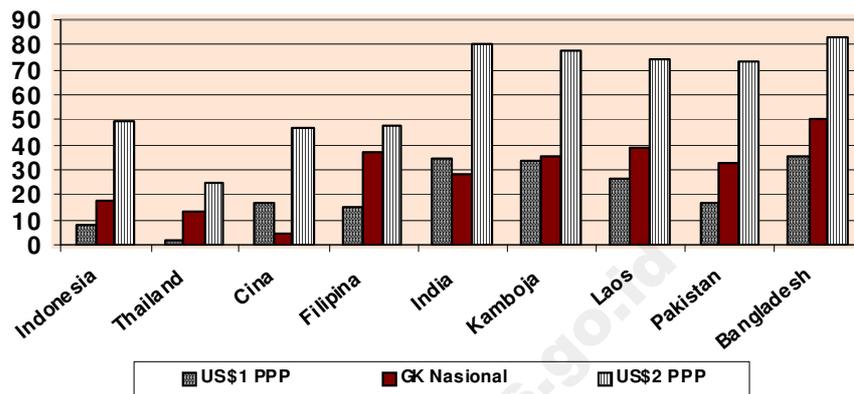
Gambar 5.1
Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
Menurut Perhitungan BPS dan Bank Dunia
1996–2009



Gambar 5.2
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia
Menurut Perhitungan BPS dan Bank Dunia
1996–2009



Gambar 5.3
Persentase Penduduk Miskin di Beberapa Negara Menurut Garis Kemiskinan Nasional dan Kriteria Bank Dunia, 2006



Sumber: Human Development Report 2006, UNDP

6. Rangkuman

BPS melakukan perhitungan jumlah penduduk miskin berdasarkan kebutuhan dasar minimal yang harus dipenuhi seseorang, baik untuk makanan maupun non-makanan, dan itu dilakukan secara konsisten sejak tahun 1984 hingga kini.

BPS melakukan perhitungan jumlah penduduk miskin berdasarkan kebutuhan dasar minimal yang harus dipenuhi seseorang.

Bank Dunia melakukan perhitungan jumlah penduduk miskin berdasarkan pengeluaran per kapita setara dengan US\$1 dan US\$2 PPP (*Purchasing Power Parity*), dengan tujuan untuk memperoleh keterbandingan tingkat kemiskinan antar negara. Nilai pengeluaran US\$1 per kapita per hari berada di bawah garis kemiskinan yang dihitung BPS, sebaliknya nilai pengeluaran US\$2 per kapita perhari berada di atas garis kemiskinan BPS, artinya lebih besar dari kebutuhan dasar minimal.

Untuk melihat apakah jumlah penduduk miskin cenderung meningkat atau menurun, harus menggunakan seri data dari sumber yang sama (konsisten). Tidak akan ada maknanya bila satu tahun tertentu menggunakan data BPS, tetapi tahun lainnya menggunakan data dari Bank Dunia, atau sebaliknya.



<http://www.bps.go.id>





Statistik Ketenagakerjaan

<http://www.321.com>

6



<http://www.bps.go.id>



KETENAGAKERJAAN

Salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan, di samping keadaan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan, adalah isu pengangguran. Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial.

Data tentang ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah.

Data tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dan dalam suatu/kurun waktu tertentu.

Untuk memenuhi kebutuhan data tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaksanakan pengumpulan dan penyajian data kependudukan dan ketenagakerjaan melalui berbagai kegiatan sensus dan survei, antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Sakernas merupakan survei yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan dengan pendekatan rumah tangga.

Sakernas dilaksanakan sejak tahun 1976, namun mulai tahun 1986 dilakukan secara berkala. Sampai saat ini, Sakernas telah mengalami berbagai perubahan terutama dalam periode pencacahan, metodologi, maupun cakupan sampel wilayah rumah tangga. Tahun 1994 sampai dengan 2001 Sakernas dilaksanakan secara tahunan, yaitu pada setiap bulan Agustus, kecuali pada tahun 1995, karena data ketenagakerjaan dapat diperoleh dari Supas 1995. Tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, selain secara tahunan, Sakernas juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 hingga tahun 2009 Sakernas dilaksanakan secara semesteran, yaitu semester I pada bulan Februari dan semester II

pada bulan Agustus. Pada tahun 2005 Sakernas semester II yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Agustus terpaksa dilaksanakan pada bulan November karena pada bulan Agustus-Oktober 2005 BPS melaksanakan kegiatan survei yang sangat urgen berskala nasional lainnya.

Dalam melaksanakan Sakernas, BPS merujuk pada konsep/definisi ketenagakerjaan yang direkomendasikan oleh *International Labour Organization* (ILO) sebagaimana tercantum dalam buku "**Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment**" *An ILO Manual on Concepts and Methods, ILO 1992*.

Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah *satu hari* atau *satu minggu*. Periode referensi satu minggu (yang lalu) paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional.

Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai *employed* (bekerja).

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dalam pelaksanaan Sakernas menggunakan konsep/definisi "*bekerja paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu*" untuk mengkategorikan seseorang (*currently economically active population*) sebagai *bekerja*, tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

Sakernas menggunakan konsep/definisi "bekerja paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu" untuk mengkategorikan seseorang sebagai bekerja, tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

1. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Angka Pengangguran

Tenaga kerja merupakan modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Penduduk usia kerja pada Februari 2009 mengalami peningkatan sebesar 2,70 juta orang dibandingkan Februari 2008, yaitu dari 165,56 juta orang menjadi 168,26 juta orang. Pada Februari 2009, sekitar 67,60 persen dari seluruh penduduk usia kerja merupakan tenaga kerja aktif dalam kegiatan ekonomi dan disebut dengan angkatan kerja yang besarnya mencapai 113,74 juta orang. Jumlah ini meningkat sebanyak 1,80 juta orang (1,61

persen) dibandingkan dengan keadaan Agustus 2008, dan meningkat sebesar 2,27 juta orang (2,03 persen) dibandingkan keadaan Februari 2008.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sejak Februari 2008 hingga Februari 2009 TPAK mengalami peningkatan sebesar 0,27 persen, yaitu dari 67,33 persen menjadi 67,60 persen. Peningkatan TPAK ini antara lain disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi nasional yang relatif membaik, sehingga memberikan pengaruh terhadap faktor-faktor produksi di Indonesia. Secara langsung naik turunnya faktor produksi ini akan memberikan dampak terhadap tinggi rendahnya faktor permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Dengan demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Hal ini dikarenakan sering terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja.

Pada Februari 2009, dari total angkatan kerja sebesar 113,74 juta orang, sekitar 91,86 persennya adalah penduduk yang bekerja. Penduduk yang bekerja pada keadaan Februari 2009 bertambah sebanyak 1,93 juta orang (1,88 persen) dibandingkan keadaan Agustus 2008 dan bertambah sebanyak 2,44 juta orang (2,39 persen) dibandingkan keadaan setahun yang lalu (Februari 2008).

Isu penting yang perlu menjadi perhatian adalah isu pengangguran. Konsep penganggur yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut sebagai pengangguran terbuka (*open unemployment*).

Pada Februari 2009, dari total angkatan kerja sebesar 113,74 juta orang, sekitar 91,86 persennya adalah penduduk yang bekerja.

ment). Jumlah penganggur pada Februari 2009 sebesar 9,26 juta orang atau mengalami penurunan sebesar 169 ribu orang (1,79%) dibandingkan keadaan Februari 2008 yang besarnya 9,43 juta orang.

Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), di mana TPT merupakan persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2009 sebesar 8,14 persen, mengalami penurunan sebesar 0,32 persen dibandingkan TPT pada Februari 2008 yang besarnya 8,46 persen.

Jumlah penganggur pada Februari 2009 sebesar 9,26 juta orang atau mengalami penurunan sebesar 169 ribu orang (1,79%) dibandingkan keadaan Februari 2008 yang besarnya 9,43 juta orang.

Tabel 6.1
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan, 2007–2009
(dalam ribuan)

Kegiatan	2007		2008		2009
	Februari (1)	Agustus (2)	Februari (3)	Agustus (4)	Februari (5)
Penduduk 15+	162 352,05 (100,00)	164 118,32 (100,00)	165 565,99 (100,00)	166 641,05 (100,00)	168 264,45 (100,00)
Angkatan Kerja	108 131,06 (66,60)	109 941,36 (66,99)	111 477,45 (67,33)	111 947,26 (67,18)	113 744,41 (67,60)
Bekerja	97 583,14 (90,25)	99 930,22 (90,89)	102 049,86 (91,54)	102 552,75 (91,61)	104 485,44 (91,86)
Penganggur	10 547,92 (9,75)	10 011,14 (9,11)	9 427,59 (8,46)	9 394,52 (8,39)	9 258,96 (8,14)
Bukan Angkatan Kerja	54 220,99 (33,40)	54 176,96 (33,01)	54 088,55 (32,67)	54 693,79 (32,82)	54 520,04 (32,40)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	(66,60)	(66,99)	(67,33)	(67,18)	(67,60)
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	(9,75)	(9,11)	(8,46)	(8,39)	(8,14)
Setengah Pengangguran	30 238,98	30 370,18	30 644,44	31 089,37	31 363,29
Terpaksa	14 914,50	14 898,19	14 595,15	14 916,51	15 001,99
Sukarela	15 324,48	15 471,99	16 049,29	16 172,86	16 361,31

Keterangan: Angka dalam kurung menunjukkan persentase

2. Lapangan Pekerjaan Utama

Berdasarkan lapangan pekerjaan pada Februari 2009, dari 104,49 juta orang yang bekerja, paling banyak bekerja di Sektor Pertanian yaitu 43,03 juta orang (41,18 persen), disusul Sektor

Perdagangan sebesar 21,84 juta orang (20,90 persen), dan Sektor Jasa Kemasyarakatan sebesar 13,61 juta orang (13,03 persen).

Selama satu tahun terakhir peningkatan jumlah penduduk yang bekerja tertinggi terjadi pada Sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi yang mengalami peningkatan 1,15 juta orang diikuti oleh Sektor Jasa Kemasyarakatan dengan kenaikan 834 ribu orang. Konsentrasi penyerapan masih didominasi oleh Pulau Jawa, di mana peranan Sektor Pertanian, Industri maupun Perdagangan dalam penyerapan tenaga kerja tampak lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lain.

Tabel 6.2
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama,
2007–2009 (dalam jutaan)

Lapangan Pekerjaan Utama	2007		2008		2009
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	42,61	41,21	42,69	41,33	43,03
Industri	12,09	12,37	12,44	12,55	12,62
Konstruksi	4,40	5,25	4,73	5,44	4,61
Perdagangan	19,43	20,55	20,68	21,22	21,84
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	5,58	5,96	6,01	6,18	5,95
Keuangan	1,25	1,40	1,44	1,46	1,48
Jasa Kemasyarakatan	10,96	12,02	12,78	13,10	13,61
Lainnya *)	1,27	1,17	1,27	1,27	1,35
Total	97,58	99,93	102,05	102,55	104,49

*) Mencakup: 1. Pertambangan dan penggalian; 2. Listrik, gas, dan air bersih

3. Status Pekerjaan Utama

Pada Februari 2009 sekitar 30,51 persen tenaga kerja bekerja pada kegiatan formal dan 69,49 persen bekerja pada kegiatan informal.

Kegiatan formal dan informal secara kasar dapat didefinisikan berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori lapangan pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan. Jika melihat status pekerjaan berdasarkan klasifikasi formal dan informal, maka pada Februari 2009 sekitar 30,51 persen tenaga kerja bekerja pada kegiatan formal dan 69,49 persen bekerja pada kegiatan informal.

Berdasarkan Tabel 6.3 terlihat bahwa dari 104,49 juta orang yang bekerja, jumlah buruh dan karyawan di Indonesia pada Februari 2009 mencapai 28,91 juta orang (27,67 persen). Sementara jumlah penduduk yang status pekerjaan utamanya adalah berusaha pada Februari 2009 mencapai 45,42 juta orang yang terdiri atas mereka yang berusaha sendiri 20,81 juta orang, berusaha dibantu buruh tidak tetap 21,64 juta orang, dan berusaha dibantu buruh tetap 2,97 juta orang. Jumlah pekerja tidak dibayar di Indonesia pada Februari 2009 mencapai 18,66 juta orang atau 17,86 persen dari jumlah penduduk yang bekerja.

Tabel 6.3
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama,
2007–2009 (dalam ribuan)

Status Pekerjaan Utama (1)	2007		2008		2009
	Februari (2)	Agustus (3)	Februari (4)	Agustus (5)	Februari (6)
Berusaha Sendiri	18 667,33 (19,13)	20 324,53 (20,34)	20 081,13 (19,68)	20 921,57 (20,40)	20 810,30 (19,92)
Berusaha dengan dibantu Buruh tidak tetap/tak dibayar	20 848,54 (21,36)	21 024,30 (21,04)	21 599,78 (21,17)	21 772,99 (21,23)	21 636,76 (20,71)
Berusaha dengan Buruh Tetap/dibayar	2 847,69 (2,92)	2 883,83 (2,89)	2 979,41 (2,92)	3 015,33 (2,94)	2 968,48 (2,84)
Pekerja/Buruh/Karyawan	26 869,05 (27,53)	28 042,39 (28,06)	28 515,36 (27,94)	28 183,77 (27,48)	28 913,12 (27,67)
Pekerja Bebas di Pertanian	6 278,47 (6,43)	5 917,32 (5,92)	6 130,48 (6,01)	5 991,49 (5,84)	6 346,12 (6,07)
Pekerja Bebas di Nonpertanian	4 267,06 (4,37)	4 458,86 (4,46)	4 798,86 (4,70)	5 292,26 (5,16)	5 151,54 (4,93)
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	17 805,00 (18,25)	17 279,00 (17,29)	17 944,84 (17,58)	17 375,34 (16,94)	18 659,12 (17,86)
T o t a l	97 583,14 (100,00)	99 930,22 (100,00)	102 049,86 (100,00)	102 552,75 (100,00)	104 485,44 (100,00)

Keterangan: Angka dalam tanda kurung menunjukkan persentase

4. Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran Menurut Provinsi

Selama periode Februari 2008–Februari 2009 umumnya jumlah pengangguran di berbagai provinsi mengalami penurunan. Penurunan pengangguran terbesar terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 62 ribu orang, kemudian diikuti Provinsi Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara dengan masing-masing penurunan sebesar 47 ribu orang dan 45 ribu orang, sedangkan provinsi dengan

peningkatan pengangguran tertinggi yaitu provinsi: DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Timur masing-masing sebesar 66 ribu, 62 ribu, dan 23 ribu orang. Sementara itu jumlah penganggur paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat sebesar 2,26 juta orang dan yang paling sedikit di Provinsi Gorontalo sebesar 23 ribu orang.

Tabel 6.4
Penduduk yang Termasuk Angkatan Kerja, Bekerja dan Tingkat Pengangguran Menurut Provinsi, Februari 2008–Februari 2009

Provinsi	Angkatan Kerja (juta)		Bekerja (juta)		Pengangguran (ribu)		Tingkat Pengangguran (%)	
	Feb 2008	Feb 2009	Feb 2008	Feb 2009	Feb 2008	Feb 2009	Feb 2008	Feb 2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nanggroe Aceh Darussalam	1,78	1,86	1,62	1,69	163,87	173,6	9,20	9,31
Sumatera Utara	5,93	6,32	5,36	5,80	566,48	521,6	9,55	8,25
Sumatera Barat	2,13	2,18	1,92	2,01	206,74	172,3	9,73	7,90
Riau	2,23	2,31	2,03	2,10	208,93	206,5	9,35	8,96
Jambi	1,26	1,34	1,18	1,27	74,22	69,9	5,91	5,20
Sumatera Selatan	3,45	3,49	3,16	3,20	292,05	292,2	8,45	8,38
Bengkulu	0,84	0,87	0,80	0,82	33,29	46,1	3,98	5,31
Lampung	3,66	3,74	3,43	3,51	230,39	230,9	6,30	6,18
Bangka Belitung	0,50	0,56	0,47	0,53	29,02	26,8	5,79	4,82
Kepulauan Riau	0,65	0,67	0,60	0,62	55,38	52,2	8,49	7,81
DKI Jakarta	4,56	4,76	4,05	4,19	504,13	570,6	11,06	11,99
Jawa Barat	18,43	19,05	16,16	16,79	2 262,41	2 257,7	12,28	11,85
Jawa Tengah	17,34	16,61	16,11	15,40	1 234,65	1 208,7	7,12	7,28
D. I. Yogyakarta	1,98	2,05	1,86	1,93	119,79	123,0	6,04	6,00
Jawa Timur	20,12	20,31	18,86	19,12	1 255,89	1 193,6	6,24	5,87
Banten	4,25	4,45	3,65	3,79	601,84	663,9	14,15	14,90
Bali	2,09	2,06	2,00	2,00	95,51	60,4	4,56	2,93
Nusa Tenggara Barat	2,07	2,04	1,97	1,92	107,80	124,9	5,20	6,12
Nusa Tenggara Timur	2,21	2,34	2,13	2,28	81,77	65,2	3,70	2,78
Kalimantan Barat	2,17	2,26	2,03	2,13	140,56	127,2	6,49	5,63
Kalimantan Tengah	1,08	1,08	1,03	1,03	51,62	49,0	4,79	4,53
Kalimantan Selatan	1,71	1,76	1,59	1,64	118,37	118,4	6,91	6,75
Kalimantan Timur	1,25	1,49	1,11	1,32	142,51	165,1	11,41	11,09
Sulawesi Utara	1,05	1,07	0,92	0,96	129,30	114,5	12,35	10,63
Sulawesi Tengah	1,22	1,23	1,13	1,17	88,43	63,2	7,25	5,11
Sulawesi Selatan	3,28	3,40	2,93	3,10	343,76	296,6	10,49	8,74
Sulawesi Tenggara	0,96	0,98	0,91	0,93	58,25	53,1	6,05	5,38
Gorontalo	0,42	0,46	0,39	0,44	29,81	23,4	7,04	5,06
Sulawesi Barat	0,48	0,52	0,45	0,49	27,15	25,4	5,68	4,92
Maluku	0,55	0,59	0,49	0,53	61,23	61,2	11,05	10,38
Maluku Utara	0,42	0,44	0,39	0,41	29,34	29,1	7,03	6,61
Papua Barat	0,34	0,36	0,31	0,33	32,00	27,9	9,30	7,73
Papua	1,05	1,09	1,00	1,04	51,13	45,0	4,85	4,13
Indonesia	111,48	113,74	102,05	104,49	9 427,59	9 258,96	8,46	8,14

Statistik Ketenagakerjaan

Pada umumnya TPT hampir di setiap provinsi untuk keadaan Februari 2009 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hanya terdapat enam provinsi yang mengalami kenaikan TPT yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, dan Nusa Tenggara Barat. TPT tertinggi pada Februari 2009 di Provinsi Banten (14,90 persen) dan terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (2,78 persen).

Selama periode Februari 2008–Februari 2009 umumnya jumlah pengangguran di berbagai provinsi mengalami penurunan.

<http://www.bps.go.id>



Angka Produksi Tanaman Pangan

7



<http://www.bps.go.id>



ANGKA PRODUKSI TANAMAN PANGAN

Data produksi tanaman pangan (padi dan palawija) merupakan salah satu indikator ketersediaan pangan nasional. Penghitungan produksi tanaman pangan secara nasional dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan Departemen Pertanian (Deptan) untuk melaksanakan cara penghitungan produksi tanaman pangan yang sama agar diperoleh hasil yang seragam dan tepat sehingga dapat digunakan secara nasional.

Tujuan penyediaan data produksi tanaman pangan secara berkesinambungan adalah untuk menyediakan informasi yang akurat dan terkini bagi kebutuhan pemerintah dan masyarakat umum. Diharapkan data tersebut dapat digunakan untuk bahan perencanaan/perumusan kebijakan berkaitan dengan ketahanan pangan nasional, sekaligus sebagai bahan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan.

Data pokok yang dikumpulkan untuk penghitungan produksi tanaman pangan adalah data luas panen dan produktivitas (hasil per hektar). Produksi tanaman pangan merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas. Untuk bahan evaluasi terhadap hasil penghitungan luas panen juga dikumpulkan data luas tanam, luas tanaman yang puso/rusak, dan luas baku lahan sawah.

Penyajian data produksi tanaman pangan tahun tertentu dilakukan sebanyak lima kali dengan status angka yang berbeda, yaitu Angka Ramalan I (ARAM I), Angka Ramalan II (ARAM II), Angka Ramalan III (ARAM III), Angka Sementara (ASEM), dan Angka Tetap (ATAP). Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca pada lampiran *Penjelasan Teknis Statistik*.

Angka Tetap (ATAP) produksi padi tahun 2008 sebesar 60,33 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).

1. Angka Tetap Produksi Padi Tahun 2008

Angka Tetap (ATAP) produksi padi tahun 2008 sebesar 60,33 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Dibandingkan produksi tahun 2007 (ATAP), terjadi peningkatan sebanyak 3,17 juta ton (5,54 persen). Kenaikan produksi terjadi karena peningkatan luas

Angka Produksi Tanaman Pangan

panen seluas 179,79 ribu hektar (1,48 persen) dan juga produktivitas sebesar 1,89 kuintal/hektar (4,02 persen).

Peningkatan produksi padi tahun 2008 tersebut terjadi di Jawa sebesar 1,88 juta ton (6,17 persen) dan di luar Jawa sebesar 1,29 juta ton (4,82 persen). Di Jawa, peningkatan produksi disebabkan oleh bertambahnya luas panen seluas 71,32 ribu hektar (1,26 persen) dan produktivitas sebesar 2,61 kuintal/hektar (4,86 persen). Demikian juga di luar Jawa, peningkatan produksi terjadi karena bertambahnya luas panen seluas 108,47 ribu hektar (1,67 persen) dan produktivitas sebesar 1,28 kuintal/hektar (3,11 persen). Kenaikan produksi padi tahun 2008 terdapat di beberapa provinsi, terutama di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Sulawesi Tengah.

Peningkatan produksi padi tahun 2008 sebesar 3,17 juta ton (5,54 persen) terjadi pada *subround* Januari-April sebesar 5,81 juta ton (26,03 persen), sedangkan *subround* Mei-Agustus dan *subround* September-Desember mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,17 juta ton (5,29 persen) dan 1,47 juta ton (11,53 persen) dibandingkan dengan produksi pada *subround* yang sama tahun 2007 (*year on year*).

2. Angka Ramalan II Produksi Padi Tahun 2009

Angka Ramalan II (ARAM II) produksi padi tahun 2009 diperkirakan sebesar 62,56 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Dibandingkan produksi tahun 2008 (ATAP), terjadi peningkatan sebanyak 2,24 juta ton (3,71 persen). Kenaikan produksi diperkirakan terjadi karena peningkatan luas panen seluas 341,56 ribu hektar (2,77 persen) dan juga produktivitas sebesar 0,44 kuintal/hektar (0,90 persen).

Kenaikan produksi padi tahun 2009 tersebut diperkirakan terjadi di Jawa sebesar 1,12 juta ton (3,47 persen) dan di luar Jawa sebesar 1,11 juta ton (3,98 persen). Di Jawa, peningkatan produksi disebabkan oleh bertambahnya luas panen seluas 167,20 ribu hektar (2,91 persen), dan produktivitas sebesar 0,31 kuintal/hektar (0,55 persen). Demikian juga di luar Jawa, kenaikan produksi terjadi karena peningkatan luas panen seluas 174,37

Peningkatan produksi padi tahun 2008 terjadi di Jawa sebesar 1,88 juta ton (6,17 persen) dan di luar Jawa sebesar 1,29 juta ton (4,82 persen).

ribu hektar (2,65 persen) dan produktivitas sebesar 0,55 kuintal/hektar (1,29 persen). Perkiraan kenaikan produksi padi tahun 2009 terdapat di beberapa provinsi, terutama di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat.

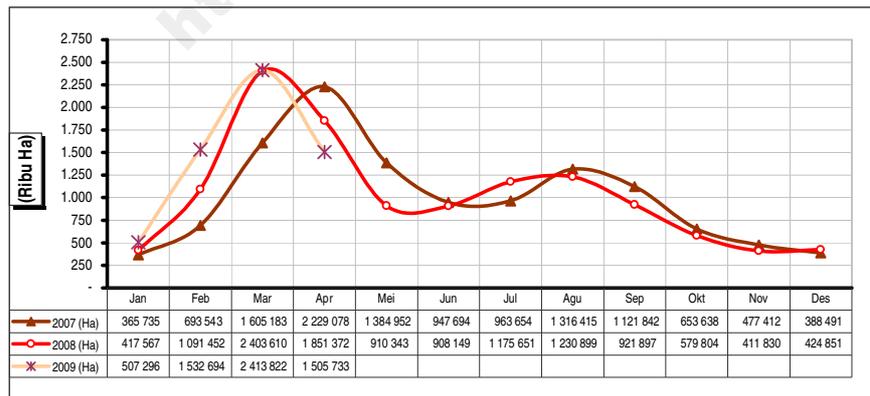
Kenaikan produksi padi tahun 2009 sebesar 2,24 juta ton (3,71 persen) terjadi pada realisasi *subround* Januari-April sebesar 1,37 juta ton (4,87 persen) serta perkiraan *subround* Mei-Agustus sebesar 0,44 juta ton (2,11 persen) dan *subround* September-Desember sebesar 0,43 juta ton (3,78 persen) dibandingkan dengan produksi pada *subround* yang sama tahun 2008 (*year on year*).

3. Pola Panen Padi Tahun 2007–2009

Pola panen padi tahun 2009 diperkirakan akan lebih mendekati pola panen tahun 2008 dibandingkan tahun 2007.

Pola panen padi tahun 2009 diperkirakan akan lebih mendekati pola panen tahun 2008 dibandingkan tahun 2007. Pada *subround* Januari–April tahun 2008 dan tahun 2009, puncak panen padi terjadi pada bulan Maret. Sedangkan tahun 2007, pada *subround* yang sama puncak panen terjadi pada bulan April (Gambar 7.1).

Gambar 7.1
Pola Panen Padi, 2007–2009



Tabel 7.1
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi
Menurut Wilayah, 2007–2009

Uraian	2007	2008	2009 (ARAM II)	Perkembangan			
				2007-2008		2008-2009	
				Absolut	(%)	Absolut	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Luas Panen (ha)							
• Jawa	5 670 947	5 742 270	5 909 468	71 323	1,26	167 198	2,91
• Luar Jawa	6 476 690	6 585 155	6 759 521	108 465	1,67	174 366	2,65
• Indonesia	12 147 637	12 327 425	12 668 989	179 788	1,48	341 564	2,77
2. Produktivitas (ku/ha)							
• Jawa	53,72	56,33	56,64	2,61	4,86	0,31	0,55
• Luar Jawa	41,21	42,49	43,04	1,28	3,11	0,55	1,29
• Indonesia	47,05	48,94	49,38	1,89	4,02	0,44	0,90
3. Produksi (ton)							
• Jawa	30 466 339	32 346 997	33 469 237	1 880 658	6,17	1 122 240	3,47
• Luar Jawa	26 691 096	27 978 928	29 091 909	1 287 832	4,82	1 112 981	3,98
• Indonesia	57 157 435	60 325 925	62 561 146	3 168 490	5,54	2 235 221	3,71

Keterangan: Kualitas produksi padi adalah Gabah Kering Giling (GKG)

Tabel 7.2
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi
Menurut Subround, 2007–2009

Uraian	2007	2008	2009 (ARAM II)	Perkembangan			
				2007-2008		2008-2009	
				Absolut	(%)	Absolut	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Luas Panen (ha)							
• Januari-April	4 893 539	5 764 001	5 959 545	870 462	17,79	195 544	3,39
• Mei-Agustus	4 612 715	4 225 042	4 274 518	-387 673	-8,40	49 476	1,17
• September-Desember	2 641 383	2 338 382	2 434 926	-303 001	-11,47	96 544	4,13
• Januari-Desember	12 147 637	12 327 425	12 668 989	179 788	1,48	341 564	2,77
2. Produktivitas (ku/ha)							
• Januari-April	45,59	48,79	49,48	3,20	7,02	0,69	1,41
• Mei-Agustus	47,88	49,50	49,96	1,62	3,38	0,46	0,93
• September-Desember	48,31	48,28	48,12	-0,03	-0,06	-0,16	-0,33
• Januari-Desember	47,05	48,94	49,38	1,89	4,02	0,44	0,90
3. Produksi (ton)							
• Januari-April	22 311 774	28 120 510	29 488 597	5 808 736	26,03	1 368 087	4,87
• Mei-Agustus	22 083 944	20 914 987	21 355 764	-1 168 957	-5,29	440 777	2,11
• September-Desember	12 761 717	11 290 428	11 716 785	-1 471 289	-11,53	426 357	3,78
• Januari-Desember	57 157 435	60 325 925	62 561 146	3 168 490	5,54	2 235 221	3,71

Keterangan: Kualitas produksi padi adalah Gabah Kering Giling (GKG)

Angka Tetap (ATAP) produksi jagung tahun 2008 sebesar 16,32 juta ton pipilan kering. Dibandingkan produksi tahun 2007, terjadi kenaikan sebesar 3,03 juta ton (22,80 persen).

4. Angka Tetap Produksi Jagung Tahun 2008

Angka Tetap (ATAP) produksi jagung tahun 2008 sebesar 16,32 juta ton pipilan kering. Dibandingkan produksi tahun 2007 (ATAP), terjadi kenaikan sebesar 3,03 juta ton (22,80 persen). Kenaikan produksi terjadi karena peningkatan luas panen seluas 371,40 ribu hektar (10,23 persen) dan produktivitas sebesar 4,18 kuintal/hektar (11,42 persen).

Kenaikan produksi jagung tahun 2008 tersebut terjadi di Jawa sebesar 1,34 juta ton (18,19 persen) dan di luar Jawa sebesar 1,69 juta ton (28,49 persen). Di Jawa, peningkatan produksi jagung disebabkan oleh naiknya luas panen seluas 156,88 ribu hektar (8,19 persen) dan juga produktivitas sebesar 3,54 kuintal/hektar (9,23 persen). Demikian juga di luar Jawa, kenaikan produksi terjadi karena peningkatan luas panen seluas 214,52 ribu hektar (12,50 persen) dan produktivitas sebesar 4,93 kuintal/hektar (14,23 persen). Kenaikan produksi jagung tahun 2008 terutama terjadi di Provinsi Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Barat.

Kenaikan produksi jagung tahun 2008 sebesar 3,03 juta ton (22,80 persen) terjadi pada *subround* Januari-April sebesar 1,51 juta ton (22,49 persen), *subround* Mei-Agustus sebesar 0,87 juta ton (23,74 persen), dan *subround* September-Desember sebesar 0,65 juta ton (22,33 persen) dibandingkan dengan produksi pada *subround* yang sama tahun 2007 (*year on year*).

5. Angka Ramalan II Produksi Jagung Tahun 2009

Angka Ramalan II (ARAM II) produksi jagung tahun 2009 diperkirakan sebesar 17,04 juta ton pipilan kering. Dibandingkan produksi tahun 2008 (ATAP), terjadi kenaikan sebesar 723,96 ribu ton (4,44 persen). Kenaikan produksi tahun 2009 diperkirakan terjadi karena naiknya luas panen seluas 95,11 ribu hektar (2,38 persen) dan produktivitas sebesar 0,82 kuintal/hektar (2,01 persen).

Kenaikan produksi jagung tahun 2009 tersebut diperkirakan terjadi di Jawa sebesar 203,97 ribu ton (2,35 persen) dan di luar Jawa sebesar 520,00 ribu ton (6,81 persen). Di Jawa, kenaikan

Angka Produksi Tanaman Pangan

produksi diperkirakan terjadi karena peningkatan luas panen seluas 29,88 ribu hektar (1,44 persen) dan juga produktivitas sebesar 0,37 kuintal/hektar (0,88 persen). Demikian juga di luar Jawa, peningkatan produksi diperkirakan disebabkan oleh bertambahnya luas panen seluas 65,23 ribu hektar (3,38 persen) dan produktivitas sebesar 1,31 kuintal/hektar (3,31 persen). Perkiraan kenaikan produksi jagung tahun 2009 terdapat di beberapa provinsi, terutama di Provinsi Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Barat.

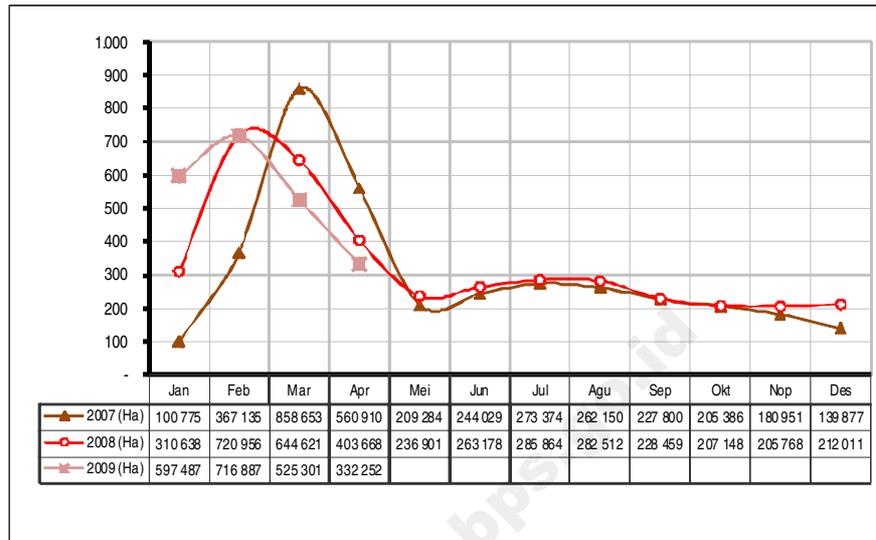
Kenaikan produksi jagung tahun 2009 sebesar 723,96 ribu ton (4,44 persen) terjadi pada realisasi *subround* Januari-April sebesar 752,56 ribu ton (9,14 persen) dan perkiraan *subround* Mei-Agustus sebesar 47,06 ribu ton (1,04 persen), sedangkan *subround* September–Desember diperkirakan mengalami penurunan sebesar 75,65 ribu ton (2,14 persen) dibandingkan dengan produksi pada *subround* yang sama tahun 2008 (*year on year*).

Kenaikan produksi jagung tahun 2009 sebesar 723,96 ribu ton (4,44 persen) dibandingkan tahun 2008.

6. Pola Panen Jagung Tahun 2007–2009

Pola panen jagung tahun 2009 diperkirakan akan lebih mendekati pola panen tahun 2008 dibandingkan tahun 2007. Pada *subround* Januari-April tahun 2008 dan tahun 2009, puncak panen jagung terjadi pada bulan Februari. Sedangkan tahun 2007, pada *subround* yang sama puncak panen terjadi pada bulan Maret (Gambar 7.2).

Gambar 7.2
Pola Panen Jagung, 2007–2009



Tabel 7.3
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung Menurut Wilayah, 2007–2009

Uraian	2007	2008	2009 (ARAM II)	Perkembangan			
				2007-2008		2008-2009	
				Absolut	(%)	Absolut	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Luas Panen (ha)							
• Jawa	1 914 854	2 071 735	2 101 618	156 881	8,19	29 883	1,44
• Luar Jawa	1 715 470	1 929 989	1 995 220	214 519	12,50	65 231	3,38
• Indonesia	3 630 324	4 001 724	4 096 838	371 400	10,23	95 114	2,38
2. Produktivitas (ku/ha)							
• Jawa	38,35	41,89	42,26	3,54	9,23	0,37	0,88
• Luar Jawa	34,65	39,58	40,89	4,93	14,23	1,31	3,31
• Indonesia	36,60	40,78	41,60	4,18	11,42	0,82	2,01
3. Produksi (ton)							
• Jawa	7 342 636	8 678 423	8 882 391	1 335 787	18,19	203 968	2,35
• Luar Jawa	5 944 891	7 638 829	8 158 824	1 693 938	28,49	519 995	6,81
• Indonesia	13 287 527	16 317 252	17 041 215	3 029 725	22,80	723 963	4,44

Tabel 7.4
Perbandingan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung
Menurut Subround, 2007–2009

Uraian	2007	2008	2009 (ARAM II)	Perkembangan			
				2007-2008		2008-2009	
				Absolut	(%)	Absolut	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Luas Panen (ha)							
• Januari-April	1 887 473	2 079 883	2 171 927	192 410	10,19	92 044	4,43
• Mei-Agustus	988 837	1 068 455	1 090 880	79 618	8,05	22 425	2,10
• September-Desember	754 014	853 386	834 031	99 372	13,18	-19 355	-2,27
• Januari-Desember	3 630 324	4 001 724	4 096 838	371 400	10,23	95 114	2,38
2 Produktivitas (ku/ha)							
• Januari-April	35,63	39,61	41,39	3,98	11,17	1,78	4,49
• Mei-Agustus	37,09	42,48	42,04	5,39	14,53	-0,44	-1,04
• September-Desember	38,38	41,49	41,54	3,11	8,10	0,05	0,12
• Januari-Desember	36,60	40,78	41,60	4,18	11,42	0,82	2,01
3 Produksi (ton)							
• Januari-April	6 725 452	8 237 885	8 990 440	1 512 433	22,49	752 555	9,14
• Mei-Agustus	3 667 865	4 538 779	4 585 840	870 914	23,74	47 061	1,04
• September-Desember	2 894 210	3 540 588	3 464 935	646 378	22,33	-75 653	-2,14
• Januari-Desember	13 287 527	16 317 252	17 041 215	3 029 725	22,80	723 963	4,44

Keterangan: Kualitas produksi jagung adalah pipilan kering

7. Angka Tetap Produksi Kedelai Tahun 2008

Angka Tetap (ATAP) produksi kedelai tahun 2008 sebesar 775,71 ribu ton biji kering. Dibandingkan produksi tahun 2007 (ATAP), terjadi kenaikan sebesar 183,18 ribu ton (30,91 persen). Kenaikan produksi terjadi karena peningkatan luas panen seluas 131,84 ribu hektar (28,72 persen) dan produktivitas sebesar 0,22 kuintal/hektar (1,70 persen).

Kenaikan produksi kedelai tahun 2008 tersebut terjadi di Jawa sebesar 94,01 ribu ton (22,12 persen) dan di luar Jawa sebesar 89,17 ribu ton (53,22 persen). Di Jawa, peningkatan produksi disebabkan oleh naiknya luas panen seluas 64,09 ribu hektar (19,68 persen) dan juga produktivitas sebesar 0,27 kuintal/hektar (2,07 persen). Demikian juga di luar Jawa, kenaikan produksi terjadi karena peningkatan luas panen seluas 67,75 ribu hektar (50,78 persen) dan produktivitas sebesar 0,20 kuintal/hektar (1,59 persen). Kenaikan produksi kedelai tahun 2008 terdapat di beberapa provinsi terutama di Provinsi Jawa Tengah,

Angka Tetap (ATAP) produksi kedelai tahun 2008 sebesar 775,71 ribu ton biji kering, terjadi kenaikan sebesar 183,18 ribu ton (30,91 persen) dibandingkan produksi tahun 2007.

Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan

Kenaikan produksi kedelai tahun 2008 sebesar 183,18 ribu ton (30,91 persen) terjadi pada *subround* Januari-April sebesar 53,69 ribu ton (34,80 persen), *subround* Mei-Agustus sebesar 43,49 ribu ton (18,74 persen), dan *subround* September–Desember sebesar 86,00 ribu ton (41,70 persen) dibandingkan dengan produksi pada *subround* yang sama tahun 2007 (*year on year*).

8. Angka Ramalan II Produksi Kedelai Tahun 2009

Angka Ramalan II (ARAM II) produksi kedelai tahun 2009 diperkirakan sebesar 924,51 ribu ton biji kering, terjadi kenaikan sebesar 19,18 persen dibandingkan produksi tahun 2008 (ATAP).

Angka Ramalan II (ARAM II) produksi kedelai tahun 2009 diperkirakan sebesar 924,51 ribu ton biji kering. Dibandingkan produksi tahun 2008 (ATAP), terjadi kenaikan sebesar 148,80 ribu ton (19,18 persen). Kenaikan produksi tahun 2009 diperkirakan terjadi karena naiknya luas panen seluas 110,44 ribu hektar (18,69 persen) dan produktivitas sebesar 0,05 kuintal/hektar (0,38 persen).

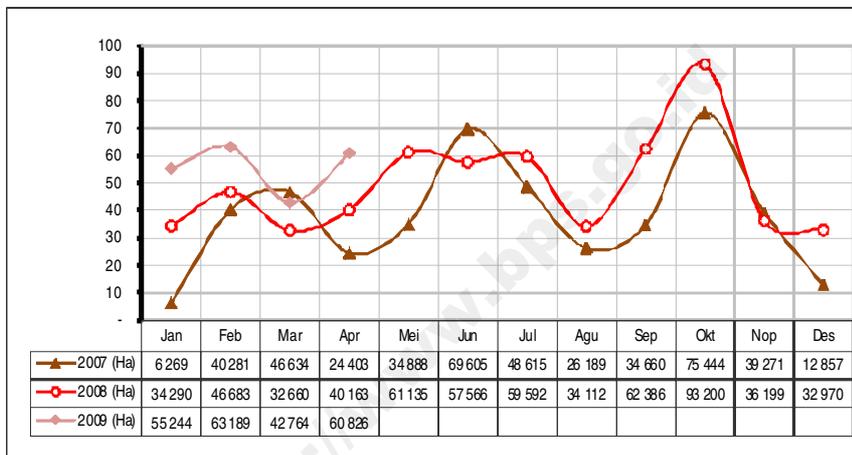
Kenaikan produksi kedelai tahun 2009 tersebut diperkirakan terjadi di Jawa sebesar 54,23 ribu ton (10,45 persen) dan di luar Jawa sebesar 94,57 ribu ton (36,84 persen). Di Jawa, peningkatan produksi diperkirakan disebabkan oleh naiknya luas panen seluas 38,35 ribu hektar (9,84 persen) dan juga produktivitas sebesar 0,07 kuintal/hektar (0,53 persen). Demikian juga di luar Jawa, kenaikan produksi diperkirakan disebabkan naiknya luas panen seluas 72,09 ribu hektar (35,83 persen) dan produktivitas sebesar 0,10 kuintal/hektar (0,78 persen). Kenaikan produksi kedelai tahun 2009 diperkirakan terjadi terutama di Provinsi Jawa Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Barat, Banten, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

Kenaikan produksi kedelai tahun 2009 sebesar 148,80 ribu ton (19,18 persen) terjadi pada realisasi *subround* Januari-April sebesar 88,84 ribu ton (42,71 persen) dan perkiraan *subround* Mei-Agustus sebesar 66,30 ribu ton (24,07 persen), sedangkan *subround* September–Desember diperkirakan mengalami penurunan sebesar 6,34 ribu ton (2,17 persen) dibandingkan dengan produksi pada *subround* yang sama tahun 2008 (*year on year*).

9. Pola Panen Kedelai Tahun 2007–2009

Pola panen kedelai tahun 2009 diperkirakan akan lebih mendekati pola panen tahun 2008 dibandingkan tahun 2007. Pada *subround* Januari-April tahun 2008 dan tahun 2009, luas panen kedelai tertinggi terjadi pada bulan Februari, sedangkan tahun 2007 terjadi pada bulan Maret (Gambar 7.3).

Gambar 7.3
Pola Panen Kedelai, 2007–2009



Tabel 7.5
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kedelai
Menurut Wilayah, 2007–2009

Uraian	2007	2008	2009 (ARAM II)	Perkembangan			
				2007–2008		2008–2009	
				Absolut	(%)	Absolut	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Luas Panen (ha)							
Jawa	325 689	389 780	428 130	64 091	19,68	38 350	9,84
Luar Jawa	133 427	201 176	273 262	67 749	50,78	72 086	35,83
Indonesia	459 116	590 956	701 392	131 840	28,72	110 436	18,69
2 Produktivitas (ku/ha)							
Jawa	13,05	13,32	13,39	0,27	2,07	0,07	0,53
Luar Jawa	12,56	12,76	12,86	0,20	1,59	0,10	0,78
Indonesia	12,91	13,13	13,18	0,22	1,70	0,05	0,38
3 Produksi (ton)							
Jawa	424 986	518 997	573 231	94 011	22,12	54 234	10,45
Luar Jawa	167 548	256 713	351 280	89 165	53,22	94 567	36,84
Indonesia	592 534	775 710	924 511	183 176	30,91	148 801	19,18

Keterangan: Kualitas produksi kedelai adalah biji kering

Tabel 7.6
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai
Menurut Subround, 2007–2009

Uraian	2007	2008	2009 (ARAM II)	Perkembangan			
				2007–2008		2008–2009	
				Absolut	(%)	Absolut	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Luas Panen (ha)							
Januari-April	117 587	153 796	222 023	36 209	30,79	68 227	44,36
Mei-Agustus	179 297	212 405	257 259	33 108	18,47	44 854	21,12
September-Desember	162 232	224 755	222 110	62 523	38,54	-2 645	-1,18
Januari-Desember	459 116	590 956	701 392	131 840	28,72	110 436	18,69
2 Produktivitas (ku/ha)							
Januari-April	13,12	13,52	13,37	0,40	3,05	-0,15	-1,11
Mei-Agustus	12,94	12,97	13,29	0,03	0,23	0,32	2,47
September-Desember	12,71	13,00	12,87	0,29	2,28	-0,13	-1,00
Januari-Desember	12,91	13,13	13,18	0,22	1,70	0,05	0,38
3 Produksi (ton)							
Januari-April	154 312	208 005	296 843	53 693	34,80	88 838	42,71
Mei-Agustus	232 008	275 496	341 799	43 488	18,74	66 303	24,07
September-Desember	206 214	292 209	285 869	85 995	41,70	-6 340	-2,17
Januari-Desember	592 534	775 710	924 511	183 176	30,91	148 801	19,18

Keterangan: Kualitas produksi kedelai adalah biji kering



<http://www.bps.go.id>





Penjelasan Teknis Statistik

<http://www...>



<http://www.bps.go.id>



PENJELASAN TEKNIS STATISTIK

1. PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)

Perkembangan ekonomi akan sesuai dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi (*economic resources*). Sumber daya tersebut adalah tanah (*land*), tenaga kerja (*labor*), dan modal (*capital*). Ketiga sumber daya tersebut dalam ilmu ekonomi disebut sebagai faktor-faktor produksi (*factor of production*). Biasanya, faktor produksi tenaga kerja dibedakan ke dalam tenaga kerja dalam arti pekerja dan tenaga kerja dalam arti keahlian. Dengan menggunakan faktor produksi tersebut, input antara (*intermediate input*) atau bahan baku, misalnya, beberapa keping papan ditambah dengan bahan material lainnya, dapat diubah menjadi sebuah kursi, dengan harga yang lebih mahal bila dibandingkan dengan keping papan semula. Pengertian inilah yang relevan dengan istilah nilai tambah (*value added*).

Sebidang lahan, dikombinasikan dengan pemanfaatan faktor produksi lainnya, digunakan untuk menumbuhkan bibit padi dan menghasilkan padi yang mempunyai nilai yang lebih tinggi pada masa panen. Dengan mengkombinasikan faktor produksi dengan input antara (*intermediate input*) seperti kapas, dapat diproduksi barang lain yang nilainya lebih tinggi. Pengertian ini dapat diteruskan untuk seluruh bentuk input antara dan diproses menjadi output.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bagaimana faktor-faktor produksi mampu mengubah bahan baku (*intermediate input*) menjadi suatu produk (*output*) yang menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Dalam terminologi ekonomi, peningkatan nilai dari *input* menjadi *output* disebut sebagai nilai tambah (*value added*). Oleh karenanya nilai tambah merupakan "milik" faktor produksi, karena merupakan balas jasa faktor produksi.

Penjumlahan nilai tambah dalam satu periode tertentu di suatu wilayah tertentu dikenal dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

Nilai tambah yang diciptakan, diklasifikasikan ke dalam 9 (sembilan) sektor ekonomi yaitu, sektor pertanian, pertambangan, industri manufaktur, perdagangan-hotel-restoran, bangunan, listrik-gas-air bersih, pengangkutan & komunikasi, keuangan, dan sektor jasa-jasa.

Nilai PDB disajikan melalui dua harga, yaitu atas dasar harga berlaku (*at current market prices*) dan harga konstan (*constant prices*). Konsep atas dasar harga konstan merupakan PDB atas dasar harga berlaku yang telah "dihilangkan" pengaruh perubahan harga. Oleh karenanya, tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari PDB atas penilaian harga konstan. Hal ini mengandung maksud bahwa

pertumbuhan ekonomi benar-benar merupakan pertumbuhan volume barang dan jasa, bukan nilai yang masih mengandung perubahan harga.

PD B ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi neto dari luar negeri (*net factor income from abroad*) - pendapatan faktor produksi dari luar dikurangi dengan pendapatan faktor produksi yang ke luar negeri, akan menghasilkan Produk Nasional Bruto (PN B) atau *Gross National Product (GNP)*. PN B dikurangi dengan pajak tak langsung neto dan penyusutan akan menghasilkan pendapatan nasional (*National Income*).

Penyusunan PD B menggunakan referensi baku yang disusun oleh *United Nations* dengan judul *A System of National Accounts (SNA)*. Acuan ini, secara terus-menerus diremajakan sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia yang terjadi. Indonesia sedang menuju acuan SNA 1993, walaupun belum secara keseluruhan.

Wilayah Domestik

Semua barang dan jasa sebagai hasil kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya dimiliki atau dikuasai oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik wilayah bersangkutan. *Output* yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan produk domestik. Wilayah domestik adalah suatu daerah yang meliputi daratan dan lautan yang berada di dalam batas-batas geografis daerah tersebut.

Output

Output perusahaan adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu meliputi produksi utama, produksi ikutan maupun produksi sampingan. *Output* tersebut merupakan hasil perkalian antara kuantitas produksi dengan unit harganya.

Beberapa pengertian *output* secara lebih rinci dijelaskan berikut ini. Barang dan jasa yang diproduksi selama suatu periode tertentu sebagian besar mungkin dijual pada periode yang sama, juga termasuk barang dan jasa yang dibuat untuk diberikan kepada pegawainya sendiri. Sisanya merupakan stok produsen dalam bentuk barang jadi dan atau setengah jadi. Barang setengah jadi meliputi barang yang masih dalam proses pembuatan atau perakitan.

Barang setengah jadi pada sektor konstruksi dicatat sebagai *output* barang jadi sektor tersebut dan merupakan pembentukan modal tetap bruto. Pertambahan nilai dari kayu dan tanaman yang masih tumbuh tidak termasuk dalam perhitungan *output*, karena belum dianggap sebagai komoditi. *Output* lapangan usaha yang memproduksi barang untuk tujuan dipasarkan selama suatu periode tertentu,

biasanya tidak sama dengan penerimaan penjualan pada periode tersebut. Barang yang dijual pada suatu periode sebagian diperoleh dari stok produksi periode yang lalu dan sebaliknya produksi periode sekarang tidak seluruhnya terjual pada periode yang sama, akan tetapi sebagian merupakan stok untuk dijual pada periode selanjutnya.

Biaya Antara

Biaya antara terdiri dari barang dan jasa yang digunakan di dalam proses produksi. Pengeluaran untuk barang dan jasa sebagai suatu kewajiban untuk penyelesaian pekerjaan, diperlakukan sebagai biaya antara. Termasuk juga sebagai biaya antara adalah pembelian peralatan kerja buruh tambang seperti lampu dan bahan peledak atau peralatan kerja buruh tani atas dasar suatu kontrak. Pengeluaran untuk transpor pegawai ke dan dari tempat bekerja dimasukkan sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Perlakuan ini dipakai karena pengeluaran transportasi tersebut sepenuhnya merupakan keputusan yang dilakukan oleh pegawai. Penggantian uang perjalanan, makan, dan sejenisnya yang diadakan oleh pegawai dalam hubungannya untuk melaksanakan tugas, diperlakukan sebagai biaya antara. Pengeluaran perusahaan untuk jasa kesehatan, obat-obatan dan rekreasi untuk pegawainya pada umumnya diperlakukan sebagai biaya antara, karena pengeluaran ini adalah untuk kepentingan perusahaan dan bukan kepentingan pegawai secara individu.

Nilai Tambah

Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan atas nilai barang dan jasa sebagai biaya antara agar menjadi output. Oleh karenanya secara matematis nilai tersebut dapat dihitung menggunakan formula sederhana berikut ini.

$$\text{NTB} = \text{Output} - \text{Input antara}$$

NTB = nilai tambah bruto

Nilai tambah bruto merupakan balas jasa faktor produksi, yang terdiri dari komponen (a) pendapatan faktor, (b) penyusutan barang modal tetap, (c) pajak tak langsung neto, sedangkan jika penyusutan dikeluarkan dari nilai tambah bruto maka akan diperoleh nilai tambah neto. Pendapatan faktor merupakan nilai tambah produsen atas penggunaan faktor faktor produksi dalam proses produksi, yang terdiri dari unsur-unsur:

- 1) Upah dan gaji sebagai balas jasa pegawai
- 2) Sewa tanah sebagai balas jasa tanah

- 3) Bunga sebagai balas jasa modal
- 4) Keuntungan sebagai balas jasa kewiraswastaan.

Faktor pendapatan yang ditimbulkan oleh produsen komoditi meliputi seluruh unsur pendapatan faktor tersebut, sedang yang ditimbulkan oleh tenaga kerja hanya terdiri dari unsur upah dan gaji.

1.1 Pendekatan Penyusunan PDB

Penjelasan yang telah diberikan merupakan PDB yang disusun menggunakan pendekatan produksi. Dalam penyusunan PDB ada 3 (tiga) pendekatan, yaitu (a) Pendekatan Produksi, (b) Pendekatan Penggunaan atau sering disebut sebagai Pendekatan Pengeluaran, dan terakhir (c) yang sampai hari ini belum dilakukan adalah Pendekatan Pendapatan.

Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Dalam pendekatan ini PDB dihitung sebagai jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi yang beroperasi dalam suatu wilayah atau suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Penggunaan sampai saat ini, sektor-sektor ekonomi tersebut dikelompokkan menjadi sembilan lapangan usaha (*activities*) yaitu:

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Industri Pengolahan;
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih;
5. Konstruksi;
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran;
7. Pengangkutan dan Komunikasi;
8. Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan;
9. Jasa-jasa.

PDB pendekatan produksi menghasilkan PDB sektoral karena di dalamnya dirinci PDB yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi, dan setiap sektor tersebut dapat dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

Pendekatan Penggunaan (*Expenditure Approach*)

PDB yang disusun dari sisi produksi besarnya harus sama dengan PDB yang disusun dari sisi pengeluaran (*expenditure*) dan diistilahkan juga dengan penggunaan. Secara agregat terdapat lima komponen, yaitu: pengeluaran konsumsi rumah tangga,

pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Menggunakan pendekatan ini, PDB dihitung sebagai jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi. Balas jasa tersebut terdiri dari: upah dan gaji (balas jasa tenaga kerja), sewa tanah (balas jasa tanah), bunga modal (*interests*) sebagai balas jasa modal, dan keuntungan (balas jasa ketrampilan). Dalam penghitungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan (*income tax*) dan pajak langsung lainnya (*other direct taxes*). Dalam definisi ini, PDB masih mencakup penyusutan (*depreciation*) dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi) atau *net indirect taxes*.

Secara konsepsi, penghitungan PDB dengan menggunakan salah satu dari ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. Hanya sayang, PDB pendekatan pendapatan, karena keterbatasan data, belum dapat disajikan.

1.2 Komponen PDB Penggunaan

Ada 6 (enam) komponen penggunaan: pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok atau *inventory*, dan ekspor serta impor.

Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa. Untuk perkiraan besarnya nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga digunakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai data pokok. Selanjutnya perkiraan pengeluaran konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, serta penyempurnaan estimasi pengeluaran konsumsi rumah tangga dilakukan melalui proses rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Tabel Input-Output (I-O) 2000.

Perkiraan besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara revaluasi untuk kelompok makanan dan deflasi untuk kelompok bukan makanan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) bukan makanan yang sesuai sebagai *deflator*-nya.

Konsumsi Pemerintah

Pemerintah sebagai konsumen akhir mencakup pemerintah umum yang terdiri dari pemerintah pusat yang meliputi unit departemen, lembaga non-departemen dan lembaga pemerintah lainnya, serta pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan daerah di bawahnya. Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan barang-barang pemerintah, dan belanja barang (termasuk belanja perjalanan, pemeliharaan, dan pengeluaran lain yang bersifat rutin), tidak termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah yang bukan dikonsumsi sendiri oleh pemerintah tetapi dikonsumsi oleh masyarakat.

Data dasar yang dipakai adalah realisasi belanja pemerintah dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perbendaharaan, Departemen Keuangan. Estimasi konsumsi pemerintah dihitung dari konsumsi pemerintah pusat, serta data realisasi pengeluaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan desa yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Besarnya penyusutan pemerintah pusat (hasil suatu survei) diperkirakan dua puluh persen dari nilai pembentukan modal tetap bruto pemerintah, sedangkan penyusutan untuk pemerintah daerah sekitar lima persen dari jumlah belanja pegawainya.

Perkiraan pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2000 untuk belanja pegawai dihitung dengan cara ekstrapolasi menggunakan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan kepangkatan sebagai ekstrapolatornya, sedangkan untuk belanja barang dihitung dengan cara deflasi menggunakan Indeks Harga Perdagangan Besar (IH PB) umum tanpa ekspor sebagai deflator-nya.

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap domestik bruto didefinisikan sebagai pengadaan, pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru yang berasal dari dalam negeri (domestik) dan barang modal baru ataupun bekas dari luar negeri. Barang modal adalah peralatan yang digunakan untuk memproduksi dan biasanya mempunyai umur pakai satu tahun atau lebih.

Pembentukan modal tetap domestik bruto dapat dibedakan atas: a) pembentukan modal dalam bentuk bangunan/konstruksi; b) pembentukan modal dalam bentuk mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan; c) pembentukan modal dalam bentuk alat angkutan; dan d) pembentukan modal untuk barang modal lainnya.

Sumber data yang digunakan berasal dari hasil perhitungan output sektor konstruksi oleh Direktorat Neraca Produksi BPS, publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, Statistik Impor yang diterbitkan oleh BPS. Metode yang digunakan dalam penghitungan pembentukan modal tetap adalah pendekatan arus barang.

Perubahan Inventori

Perubahan inventori dihitung dari pengurangan posisi inventori pada akhir tahun dengan posisi inventori pada awal tahun. Data mengenai nilai perubahan inventori yang mempunyai data kuantum, seperti: komoditi perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan dan industri berasal dari publikasi masing-masing direktorat terkait di BPS, yaitu Statistik Pertanian, Statistik Pertambangan, Statistik Industri Besar dan Sedang, dengan mengalikan kuantum dan harga masing-masing komoditi. Sementara itu, data inventori yang tidak mempunyai kuantum diperoleh dari Laporan Keuangan Perusahaan yang memuat nilai inventori di dalamnya.

Penghitungan perubahan inventori atas dasar harga konstan 2000 untuk komoditi inventori yang mempunyai data kuantum dilakukan dengan cara revaluasi, sedangkan untuk komoditi inventori yang tidak mempunyai kuantum dilakukan dengan cara deflasi dengan IHPB yang sesuai sebagai deflatornya.

Diskrepansi statistik merupakan selisih penjumlahan nilai tambah bruto (PDB) sektoral dengan penjumlahan komponen permintaan akhir, seperti: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto dan ekspor neto. Jadi, diskrepansi statistik merupakan selisih statistik yang terdapat pada sektor atau komponen lainnya.

Ekspor dan Impor

Ekspor dan impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk Indonesia dengan penduduk negara lain, yang meliputi ekspor dan impor barang, jasa pengangkutan, jasa asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya. Termasuk juga dalam ekspor adalah pembelian langsung atas barang dan jasa di wilayah domestik oleh penduduk negara lain. Sebaliknya pembelian langsung barang dan jasa di luar negeri oleh penduduk Indonesia, dimasukkan sebagai impor. Data yang digunakan diperoleh dari beberapa sumber yaitu Statistik Ekspor dan Impor, BPS; Neraca Pembayaran baik dari Bank Indonesia maupun Dana Moneter Internasional; serta data dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ekspor barang dinilai menurut harga *free on board (fob)*, sedangkan impor menurut *cost insurance freight (cif)*. Kurs dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah dibedakan untuk ekspor dan impor. Untuk ekspor digunakan rata-rata

kurs beli dolar AS (dari Bank Indonesia) yang ditimbang dengan nilai nominal transaksi ekspor bulanan, sedangkan untuk impor digunakan rata-rata kurs jual dolar AS oleh bank, yang ditimbang dengan nilai nominal transaksi impor bulanan. Sumber data yang digunakan untuk estimasi nilai ekspor dan impor barang adalah publikasi tahunan BPS, sedangkan untuk ekspor dan impor jasa diperoleh dari neraca pembayaran yang dipublikasi oleh Bank Indonesia.

Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri atas Faktor Produksi

Pendapatan neto di sini hanya mencakup pendapatan atas modal dan bunga neto yang diturunkan dari Neraca Pembayaran Indonesia yang berasal dari Bank Indonesia. Pendapatan neto yang dimaksud di sini adalah selisih antara pendapatan yang mengalir masuk dari luar negeri dengan pendapatan yang mengalir ke luar negeri. Data asal yang ada pada neraca pembayaran disajikan dalam nilai dolar AS. Data pendapatan yang mengalir masuk dan keluar telah dikonversikan dari nilai dolar AS masing-masing dengan menggunakan kurs ekspor dan impor rata-rata tertimbang.

Perkiraan atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara deflasi, menggunakan *indeks harga per unit impor dan ekspor* masing-masing sebagai *deflator*-nya.

Pajak Tidak Langsung Neto dan Penyusutan

Pajak tidak langsung neto mencakup pajak tidak langsung yang diterima pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikurangi dengan subsidi bahan bakar minyak dan pupuk. Data pajak tidak langsung dan subsidi tersebut bersumber pada realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat dan daerah yang diperoleh baik dari Departemen Keuangan maupun BPS. Selanjutnya, besarnya penyusutan diperkirakan dengan menggunakan persentase terhadap PDB yang diturunkan dari Tabel Input Output Indonesia 2000.

Perkiraan atas dasar harga konstan 2000, untuk pajak tidak langsung neto dihitung dengan cara deflasi menggunakan *indeks harga implisit PDB*, sedangkan untuk penyusutan menggunakan persentase yang sama terhadap PDB atas dasar harga konstan.

PDB atas dasar harga berlaku (*at current market prices*) atau nominal, PDB yang dinilai atas dasar harga berlaku pada tahun-tahun bersangkutan.

PNB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu negara.

PDB harga konstan (riil) merupakan PDB atas dasar harga berlaku, namun tingkat perubahannya telah “dikeluarkan”. Peningkatan besarnya nilai PDB ini dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor.

Distribusi PDB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara.

Distribusi PDB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.

PDB penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri.

PDB dan PNB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai rata-rata PDB dan PNB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai ini belum memperhatikan kesenjangan antar satu/kelompok orang dengan kelompok lainnya.

PDB dan PNB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi triwulan ke triwulan (*q to q*)

PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi tahun ke tahun (*y on y*)

PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dalam tahun tertentu dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi *c to c*:

PDB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan suatu triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya.

Sumber pertumbuhan (*source of growth*) menunjukkan sektor atau komponen pengeluaran dalam PDB yang menjadi penggerak pertumbuhan. Untuk memperoleh

sumber-sumber per tumbuhan, laju per tumbuhan ekonomi ditimbang dengan masing-masing *share* sektor atau komponen pengeluaran terhadap PDB.

1.3 Penilaian Harga Konstan PDB

Dalam kasus-kasus data harga tahun-tahun bersangkutan tidak tersedia, dilakukan estimasi dengan melihat berbagai indeks harga yang bersesuaian. Seperti telah dijelaskan, terdapat 2 (dua) penilaian harga: harga berlaku dan harga konstan. Untuk memperoleh penilaian harga berlaku cukup mudah, karena hanya mengikuti harga yang ada. Namun demikian, ketika data diperlukan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, diperlukan penilaian atas dasar harga konstan. Terdapat tiga metode yang digunakan memperoleh penilaian harga atas dasar harga konstan, yaitu:

- a. **Revaluasi** yaitu perkalian kuantum produksi tahun yang berjalan dengan harga tahun dasar tertentu (tahun 2000) untuk memperoleh PDB atas dasar harga konstan.
- b. **Ekstrapolasi** yaitu dengan cara mengalikan nilai tahun dasar tertentu dengan suatu indeks kuantum tahun-tahun setelahnya dibagi 100.
- c. **Deflasi** yaitu dengan cara membagi nilai atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan dengan indeks harga yang bersesuaian dibagi 100.

1.4 Publikasi dan Ketersediaan Data

Publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik meliputi PDB untuk tingkat nasional dan PDRB untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sampai saat ini publikasi yang tersedia meliputi:

- a. Penyampaian Berita Resmi Statistik mengenai PDB dan PDRB serentak di seluruh Indonesia setiap satu setengah bulan setelah berakhirnya triwulan berjalan. (Misal triwulan I (Januari-Maret) akan diumumkan tanggal 15 Mei tahun berjalan)
- b. Pendapatan Nasional Indonesia Tahun 2004-2007
- c. Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2004-2007
- d. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2003-2007 (menurut Lapangan Usaha)
- e. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2003-2007 (menurut Penggunaan)
- f. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2003-2007

2. INFLASI

Inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Barang dan jasa tersebut jumlahnya sangat banyak, namun “keranjang” barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung konsumsi rumah tangga seluruhnya berjumlah 774 komoditas. Jumlah komoditas tersebut bervariasi antar kota, yang terkecil terdapat di Kota Tarakan sebanyak 284 komoditas, sedangkan yang terbanyak terdapat di Jakarta (441 komoditas), secara rata-rata sebanyak 335 komoditas (dari 66 kota). Angka tersebut merupakan hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2007 yang merupakan patokan untuk menyusun inflasi.

Inflasi dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan menggunakan rumus Laspeyres yang dimodifikasi (*Modified Laspeyres*). Rumus tersebut mengacu pada manual Organisasi Buruh Dunia (*International Labour Organisation/ILO*). Pengelompokan IHK didasarkan pada klasifikasi internasional baku yang tertuang dalam *Classification of Individual Consumption According to Purpose* (COICOP) yang diadaptasi untuk kasus Indonesia menjadi Klasifikasi Baku Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

Inflasi IHK atau inflasi umum (*headline inflation*)

inflasi seluruh barang/jasa yang dimonitor harganya secara periodik. Inflasi umum adalah komposit dari inflasi inti, inflasi *administered prices*, dan inflasi *volatile goods*.

Secara umum penghitungan inflasi dari IHK mengikuti rumus berikut ini.

$$INF_t = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100$$

Contoh:

IHK Umum bulan Juli 2009 sebesar 114,61 sedangkan IHK Umum bulan Juni 2009 sebesar 114,10 maka besarnya angka inflasi IHK Umum bulan Juli 2009 adalah $[(114,61-114,10)/114,10] \times 100\% = 0,45\%$.

Inflasi inti (*core inflation*)

inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum, seperti ekspektasi inflasi, nilai tukar, dan

keseimbangan permintaan dan penawaran, yang sifatnya cenderung permanen, *persistent*, dan bersifat umum. Berdasarkan SBH 2007 jumlah komoditasnya sebanyak 694 antara lain beras, kontrak rumah, upah buruh, mie, susu, mobil, sepeda motor, dan sebagainya.

Contoh:

IHK Komponen inti (*core*) bulan Juli 2009 sebesar 113,03 sedangkan IHK Komponen inti (*core*) bulan Juni 2009 sebesar 112,68 maka besarnya angka inflasi IHK Komponen inti (*core*) bulan Juli 2009 adalah $[(113,03-112,68)/112,68] \times 100\% = 0,31\%$.

Inflasi administered prices

adalah inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya secara umum dapat diatur pemerintah. Berdasar SBH 2007 jumlah komoditasnya sebanyak 19 antara lain bensin, tarif listrik, rokok, dan sebagainya.

Contoh:

IHK Komponen *administered prices* bulan Juli 2009 sebesar 111,91 sedangkan IHK Komponen *administered prices* bulan Juni 2009 sebesar 111,77 maka besarnya angka inflasi IHK Komponen *administered prices* bulan Juli 2009 adalah $[(111,91-111,77)/111,77] \times 100\% = 0,13\%$.

Inflasi volatile goods

Inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya sangat bergejolak. Berdasarkan tahun dasar 2007, inflasi *volatile goods* masih didominasi bahan makanan, sehingga sering disebut juga sebagai inflasi *volatile foods*. Jumlah komoditasnya sebanyak 61 antara lain beras, minyak goreng, cabe, daging ayam ras, dan sebagainya.

Contoh:

IHK Komponen *volatile goods* bulan Juli 2009 sebesar 123,79 sedangkan IHK Komponen *volatile goods* bulan Juni 2009 sebesar 122,30 maka besarnya angka inflasi IHK Komponen *volatile goods* bulan Juli 2009 adalah $[(123,79-122,30)/122,30] \times 100\% = 1,22\%$.

Paket komoditas

“Sekeranjang” barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi oleh masyarakat di suatu kota yang diukur IHK-nya.

Diagram timbang

Diagram yang menunjukkan persentase nilai konsumsi tiap jenis barang/jasa terhadap total rata-rata pengeluaran rumah tangga di suatu kota.

Bahan dasar penyusunan inflasi adalah hasil Survei Biaya Hidup (SBH) (*Cost of Living Survey*). SBH diadakan antara 5-10 tahun sekali, dan kini SBH 2007 menjadi dasar penyusunan IHK. Sekitar 100 ribu rumah tangga di Indonesia ditanya mengenai tingkat pengeluaran serta jenis dan nilai barang/jasa apa saja yang dikonsumsi selama setahun penuh.

Secara nasional paket komoditas yang diperoleh dari hasil SBH 2007 menunjukkan bobot komoditas makanan turun dari 43,38 persen menjadi 36,12 persen. Selain dari paket komoditas, hasil SBH lainnya yang digunakan untuk menghitung inflasi adalah Diagram Timbang (*Weighting Diagram*).

Rumus IHK (modifikasi Laspeyres):

$$I_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni} - P_{(n-1)i}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^k P_{oi} Q_{oi}} \times 100$$

dengan:

- I_n = Indeks periode ke-n
- P_{ni} = Harga jenis barang i, periode ke-n
- $P_{(n-1)i}$ = Harga jenis barang i, periode ke-(n-1)
- $P_{(n-1)i} Q_{oi}$ = Nilai konsumsi jenis barang i, periode ke-(n-1)
- $P_{oi} Q_{oi}$ = Nilai konsumsi jenis barang i pada tahun dasar
- k = Jumlah jenis barang paket komoditas

Rumus Inflasi:

a. Untuk bulanan

$$\frac{\text{IHK bulan (n)} - \text{IHK bulan (n - 1)}}{\text{IHK bulan (n - 1)}} \times 100$$

b. Untuk Tahunan

$$\frac{\text{IHK bulan n tahun (t)} - \text{IHK bulan n tahun (t-1)}}{\text{IHK bulan n tahun (t-1)}} \times 100\%$$

c. Penyusunan IHK Nasional

$$\text{IHK}_{\text{Nasional}} = \frac{\sum_{i=1}^{66} \text{IHK}_i W_i}{100}$$

Pengumpulan data harga menggunakan daftar pertanyaan dan pencacahannya dibedakan sesuai waktunya: mingguan, 2 (dua) mingguan dan bulanan. Data harga diperoleh dari responden melalui wawancara dan *scan barcode*.

Contoh Penghitungan Angka Inflasi:

a. Inflasi Tahunan

Inflasi dihitung secara titik per titik (*point-to-point*) dalam skala bulanan maupun tahunan. Angka-angka di dalam Tabel 3.1 digunakan dalam formula yang telah diberikan. Misalnya angka $\text{IHK}_{\text{Des}2008}$ sebesar 113,86 diperoleh dari Tabel 3.1, kolom (4), baris Desember, sedangkan angka $\text{IHK}_{\text{Des}2007}$ (2007=100) sebesar 102,52. Selanjutnya dengan memasukkan angka-angka yang bersesuaian dengan formula di bawah dan dengan sedikit penghitungan diperoleh angka inflasi tahun 2008 sebesar 11,06%.

$$\begin{aligned} \text{Inflasi Tahun 2008} &= \frac{\text{IHK}_{\text{Des}2008} - \text{IHK}_{\text{Des}2007}}{\text{IHK}_{\text{Des}2007}} \times 100\% \\ &= \frac{113,86 - 102,52}{102,52} \times 100\% \\ &= 11,06\% \end{aligned}$$

b. Inflasi Tahunan Kumulatif (Metode sebelum April 1998)

Angka inflasi tahunan kumulatif dihitung dengan cara menjumlahkan angka inflasi masing-masing bulan, mulai Januari sampai dengan Desember pada tahun yang bersangkutan. Secara formula dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Inflasi Tahun } t &= I_{\text{Jan } t} + I_{\text{Feb } t} + \dots + I_{\text{Des } t} \\ \text{Inflasi Tahun 2008} &= I_{\text{Jan}2008} + I_{\text{Feb}2008} + \dots + I_{\text{Des}2008} \\ &= 1,77 \% + 0,65 \% + \dots + (-0,04) \% \\ &= 11,19\% \end{aligned}$$

Angka-angka di atas diperoleh dari Tabel 3.1, kolom (8), baris Januari (1,77%), Februari (0,65%) sampai dengan Desember (-0,04%). Perlu ditambahkan bahwa angka inflasi yang dihitung berdasarkan formula *point to point* hasilnya tidak sama dengan angka inflasi yang dihitung berdasarkan formula kumulatif. BPS dalam penghitungan inflasinya menggunakan formula *point to point*. Jadi untuk contoh tahun 2008, angka inflasi sebesar 11,06% bukan 11,19%.

c. Inflasi Triwulanan *Point to Point* :

$$\begin{aligned} \text{Inflasi Triwulan I 2009} &= \frac{IHK_{\text{Mar } 2009} - IHK_{\text{Des } 2008}}{IHK_{\text{Des } 2008}} \times 100\% \\ &= \frac{114,27 - 113,86}{113,86} \times 100\% \\ &= 0,36\% \end{aligned}$$

Penyajian dan Akses Data

Data inflasi disajikan dalam 7 (tujuh) kelompok pengeluaran, yaitu: Bahan Makanan; Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau; Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar ; Sandang; Kesehatan; Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga; Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan.

Data inflasi disajikan juga dalam tiga kelompok perubahan harga, yaitu inflasi komoditas yang harganya bergejolak (*volatile good inflation*), inflasi komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah (*administered price inflation*), dan inflasi inti (*core inflation*).

Data inflasi biasanya disajikan menurut 45 kota, namun sejak bulan Juli 2008 disajikan menurut kota (66 kota) dan nasional (gabungan 66 kota). Data inflasi disajikan dalam waktu bulanan dan dapat diakses melalui Publikasi, CD/Disket, Website BPS (<http://www.bps.go.id>), Perpustakaan/Toko Buku BPS, dan *Subject Matter* terkait.

3. EKSPOR-IMPOR BARANG

BPS dengan memanfaatkan dokumen pemberitahuan ekspor/impor barang yang diperoleh dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), dilakukan pengolahan dan penyajian data statistik ekspor dan impor barang di Indonesia, dan hasilnya disajikan dalam Statistik Ekspor-Impor Barang.

Penyajian data ekspor-impor mencakup volume maupun nilai, menurut komoditi (satu jenis barang, kelompok barang); negara tujuan/asal, dan pelabuhan muat/bongkar barang di suatu provinsi.

Data ini berguna bagi pemerintah, swasta dan perorangan. Bagi pemerintah, data tersebut dapat membantu proses perumusan kebijakan maupun untuk memantau kinerja perekonomian. Di samping itu, data tersebut dipakai pula untuk menyusun Produk Domestik Bruto (PDB) dan Neraca Pembayaran (BOP). Bagi swasta dan perorangan, statistik ekspor-impor dapat dipakai untuk berbagai analisis ekonomi dan sosial.

Pencatatan data ekspor-impor oleh BPS sesuai rekomendasi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), *United Nations Statistical Division (UNSD)*. Sesuai rekomendasi tersebut, BPS mengambil wilayah pabean (*the custom frontier*) sebagai wilayah statistik. Wilayah ini dipilih karena sumber datanya berupa dokumen ekspor-impor yang harus melalui penyelesaian pabean (*customs declaration*). Metode pengumpulan data tersebut juga dilakukan oleh negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara ASEAN, kecuali Kamboja yang pengumpulan data statistik ekspor-impornya dilakukan melalui survei ke perusahaan eksportir (pelaku ekspor) dan importir (pelaku impor).

Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi yang dipakai dalam pencatatan ekspor-impor barang yang dilakukan oleh BPS berdasarkan konsep dan definisi dalam *International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions* (series M no.52 Revisi 2) yang diterbitkan oleh *United Nations* tahun 1998. Sebagai anggota *United Nations Statistical Office* dan berdasarkan konvensi internasional maka BPS harus mengikuti/memakai konsep

dan definisi tersebut. Dengan demikian data yang dihasilkan oleh BPS bisa dipakai untuk perbandingan internasional.

Berdasarkan konsep dan definisi *International Merchandise Trade Statistics* beberapa hal dapat diberikan di sini.

a. Ekspor barang adalah seluruh barang yang dibawa ke luar dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun non-komersial (seperti barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri yang hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut. Tidak termasuk dalam statistik ekspor adalah: (1) Pakaian, barang pribadi dan perhiasan milik penumpang yang bepergian ke luar negeri; (2) Barang-barang yang dikirim untuk perwakilan suatu negara di luar negeri; (3) Barang untuk eksepsi/pameran; (4) Peti kemas untuk diisi kembali; (5) Uang dan surat-surat berharga; (6) Barang-barang untuk contoh (*sample*).

b. Impor barang adalah seluruh barang yang masuk ke wilayah suatu negara baik bersifat komersial maupun bukan komersial, serta barang yang akan diolah di dalam negeri yang hasilnya dikeluarkan lagi dari negara tersebut. Tidak termasuk dalam statistik impor adalah: (1) Pakaian dan barang-barang perhiasan penumpang; Barang-barang penumpang untuk dipakai sendiri, kecuali lemari es, pesawat TV dan sebagainya; (2) Barang-barang yang dikirim untuk keperluan perwakilan (kedutaan) suatu negara; (3) Barang-barang untuk ekspedisi/penelitian ilmiah dan eksepsi/pameran; (4) Pembungkus/peti kemas; (5) Uang dan surat-surat berharga; (6) Barang-barang sebagai contoh (*sampel*).

Sebagian impor kapal laut dan pesawat beserta suku cadangnya termasuk dalam statistik impor. Barang-barang luar negeri yang diolah atau diperbaiki di dalam negeri tetap dicatat sebagai barang impor, meskipun setelah barang tersebut selesai diproses akan kembali ke luar negeri (*re-import*).

Statistik ekspor-impor di Indonesia diperoleh dari administrasi kepabeanan. Semua barang yang masuk atau ke luar dari batas-batas kepabeanan (*customs area*) Indonesia harus dicatat oleh Pabean dalam hal ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Informasi yang dicatat antara lain tujuan/asal dan jenis barang (komoditi) tersebut.

Sistem Pencatatan

Sistem pencatatan Statistik Ekspor barang memberlakukan sistem Perdagangan Umum (*general trade system*). Di mana semua barang yang ke luar dari wilayah Indonesia dicatat sebagai ekspor. Dengan demikian barang-barang yang keluar dari kawasan khusus (seperti Kawasan Berikat) juga dimasukkan sebagai barang ekspor.

Statistik ekspor disusun dari dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang diisi oleh eksportir. Periode penentuan ekspor adalah tanggal diberikannya izin muat barang tersebut (*custom declaration*) yang diberikan oleh KPPBC. Metode pencatatan nilai ekspor adalah pada harga FO B (*Free on Board*) yaitu harga barang sampai dimuat di kapal.

Sampai dengan tahun 2007 sistem pencatatan Statistik Impor masih menggunakan sistem perdagangan khusus (*special trade system*). Dalam sistem ini, wilayah Kawasan Berikat dianggap sebagai Luar Negeri, sehingga barang impor yang masuk ke Kawasan Berikat tidak dicatat sebagai impor. Namun, sejak Januari 2008 barang impor yang masuk ke Kawasan Berikat dicatat sebagai impor sehingga pencatatan statistik impor menggunakan sistem Perdagangan Umum (*general trade system*).

Pencatatan dilakukan berdasarkan hasil pengolahan dokumen kepabeanan, yaitu dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diisi oleh importir dan sudah mendapat legalisasi/persetujuan bongkar barang dari KPPBC setempat. Nilai impor dicatat dalam harga CIF (*Cost, Insurance and Freight*).

Klasifikasi Komoditi

Komoditi (barang) ekspor-impor diklasifikasikan menurut klasifikasi komoditas internasional yaitu *International Commodity Description and Coding System—Harmonized System (HS)* yang dibuat oleh Organisasi Bea dan Cukai Dunia (*World Customs Organization/WCO*) dan *Standards International Trade Classification (SITC)* Revisi 3. Komisi Statistik PBB (*UN Statistical Commission*) menyarankan kepada negara-negara di dunia untuk menggunakan klasifikasi HS dalam penyajian data statistik perdagangan internasional.

Kode HS yang digunakan saat ini terdiri dari 10 digit, yaitu 6 digit pertama merupakan standar internasional, 2 digit selanjutnya merupakan standar ASEAN, dan 2 digit terakhir hanya berlaku untuk negara bersangkutan. Kode HS yang dipakai sekarang berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) Tahun 2007, sementara itu untuk kode negara berdasarkan *United Nation Country Codes*.

Penyajian Data

Penyajian dan penyebarluasan statistik ekspor-impor diumumkan oleh BPS pada hari kerja pertama setiap bulan melalui *press-release* bersamaan dengan pengumuman data strategis lainnya.

Data bulanan dan tahunan baik secara agregasi maupun rinci per komoditi tersedia bagi publik dalam bentuk *hard copy* (buku) dan *soft copy* (disket, CD dsb).

Di samping itu, publik juga dapat mengakses data pada website BPS dengan alamat: <http://www.bps.go.id>. Pada website tersebut tersaji data ekspor-impor dalam bentuk statis dan dinamis. Dalam bentuk statis, data tersedia dalam bentuk tabel-tabel statis yang tidak bisa diubah. Sementara dalam bentuk dinamis, pengguna data dapat men-*download* data ekspor-impor sesuai dengan komoditi yang diperlukan.

3.1 Statistik ekspor-impor yang dapat disajikan dan bersifat substantif antara lain:

- a. Impor menurut Komoditi (HS 1, 2, dan 10 dijit; STC 1, 2 dan 3 digit ; Impor menurut Penggunaan Barang /Broad Economic Categories)
- b. Ekspor/Impor menurut Negara Tujuan/Asal
- c. Ekspor/Impor menurut Pelabuhan Muat/Bongkar
- d. Ekspor/Impor menurut Komoditi dan Negara Tujuan/Asal
- e. Ekspor/Impor menurut Komoditi dan Pelabuhan Muat/Bongkar
- f. Ekspor/Impor menurut Negara Tujuan/Asal dan Komoditi
- g. Ekspor/Impor menurut Provinsi dan Komoditi

3.2 Penyajian data dikategorikan dalam 2 (dua) status yaitu:

- a. Angka Sementara ekspor-impor dirilis sekitar 1 (satu) bulan setelah akhir bulan pencatatan. Sebagai contoh, data yang dicatat pada bulan Juli akan dirilis pada bulan September pada tahun yang sama, dan diterbitkan setiap bulan.
- b. Angka Tetap akan disajikan 2 (dua) bulan setelah akhir bulan pencatatan. Sebagai contoh angka tetap ekspor-impor Juli akan dirilis pada bulan Oktober tahun yang sama.

Sedangkan data ekspor-impor tahunan dapat diperoleh dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pencatatan. Sebagai contoh, angka ekspor tahun 2008 dapat diperoleh pada bulan Maret 2009.

4. KEMISKINAN

Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penduduk miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-makanan (GKNM).

$$GK = GKM + GKNM$$

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Ke 52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh orang miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin.

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM)

Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

4.1 Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara, yang merupakan Garis

Kemiskinan periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM).

Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Selanjutnya GKM tersebut disetarakan dengan 2.100 kilo kalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori.

Garis kemiskinan nonmakanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi nonmakanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/subkelompok nonmakanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/subkelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi nonmakanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi.

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Nonmakanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

4.2 Ukuran Kemiskinan

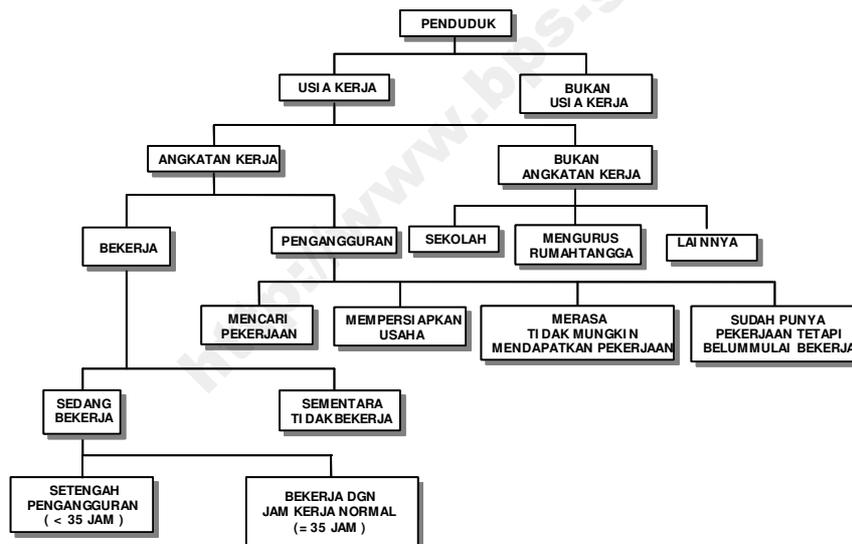
- a. *Head Count Index* ($HCI-P_0$), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- c. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2) adalah ukuran yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

5. KETENAGAKERJAAN

Konsep/definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi *International Labour Organization (ILO)* sebagaimana tercantum dalam buku “*Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment*” An ILO Manual on Concepts and Methods, ILO 1992.

Hal ini dimaksudkan terutama agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia. Menurut Konsep *Labor Force Framework*, penduduk dibagi dalam beberapa kelompok. Kelompok-kelompok tersebut dapat digambarkan dalam Diagram Ketenagakerjaan sebagai berikut.

Gambar 5.1
Diagram Ketenagakerjaan



Penduduk

Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Usia Kerja

Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja (economically active population) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari usia 10 tahun) dan tanpa batas atas usia kerja.

Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas usia kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasinya. Beberapa contoh:

- Batas bawah: Mesir (6 tahun), Brazil (10 tahun), Swedia, USA (16 tahun), Kanada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 tahun), Venezuela (10 dan 15 tahun).
- Batas atas: Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, Mexico (65 tahun), banyak negara seperti Indonesia tidak ada batas atas.

Angkatan Kerja

Konsep angkatan kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur.

Bukan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Bekerja

Kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit dan sejenisnya.

Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Romania, Federasi Rusia, dan lainnya.

Pengangguran

Definisi baku untuk Penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Definisi ini digunakan pada pelaksanaan Saker nas 1986 sampai dengan 2000, sedangkan sejak tahun 2001 definisi pengangguran mengalami penyesuaian/perluasan menjadi sebagai berikut:

Penganggur adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut sebagai penganggur terbuka (*open unemployment*).

Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Saker nas, terdiri atas:

- a. mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan,
- b. mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha,
- c. mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
- d. mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Aktivitas/kegiatan ekonomi

Aktivitas/kegiatan ekonomi yang digunakan merujuk pada *the United Nations System of National Accounts (SNA)*. Penduduk usia kerja dikategorikan sebagai bekerja/mempunyai pekerjaan jika yang bersangkutan bekerja (meskipun hanya bekerja satu jam dalam periode referensi) atau mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja.

Sejalan dengan *the labour force framework*, definisi internasional untuk bekerja didasarkan pada periode referensi yang pendek (satu minggu atau satu hari); *a snapshot picture of the employment situation at a given time*.

Setengah Penganggur

Penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal (dalam hal ini 35 jam seminggu, tidak termasuk yang sementara tidak bekerja) dikategorikan sebagai setengah penganggur.

Setengah Penganggur Terpaksa

Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.

Setengah Penganggur Sukarela

Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutkan sebagai pekerja paruh waktu/*part time worker*).

Jumlah Jam Kerja

Jumlah jam kerja seluruhnya yang dilakukan oleh seseorang (tidak termasuk jam istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu.

Lapangan Usaha

Bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005. Dalam pengumpulan datanya menggunakan 18 kategori tetapi dalam penyajian/publikasinya menggunakan 9 kategori/sektor yaitu:

1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas dan air
5. Bangunan
6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel
7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi
8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan
9. Jasa kemasyarakatan

Status Pekerjaan

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/ kegiatan. Status Pekerjaan terbagi menjadi:

1. Berusaha sendiri
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar

3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar
4. Buruh/Karyawan/Pegawai
5. Pekerja bebas di pertanian
6. Pekerja bebas di nonpertanian
7. Pekerja keluarga/tak dibayar

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah.

TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja.

Data Ketenagakerjaan diperoleh melalui kegiatan survei Sakernas

Variabel substantif yang dikumpulkan

- Identitas individu (nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, umur, dan pendidikan).
- Kegiatan Seminggu Yang Lalu (bekerja, penganggur, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya).
- Pekerjaan Utama (lapangan usaha/pekerjaan, jenis pekerjaan, status pekerjaan, jam kerja, pendapatan/upah/gaji bersih).
- Pekerjaan Tambahan (lapangan usaha/pekerjaan).
- Kegiatan Mencari Pekerjaan/Mempersiapkan Usaha.
- Pengalaman Kerja.

Kemampuan Penyajian

Berdasarkan metodologi dan variabel substantif, maka hasil Sakernas dapat disajikan menurut:

- Provinsi (kab/kota untuk Sakernas Agustus)
- Daerah Perkotaan/Pedesaan
- Jenis Kelamin

- Umur
- Pendidikan
- Lapangan Usaha/Pekerjaan
- Jenis Pekerjaan
- Status Pekerjaan
- Jam Kerja

Periode referensi

Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan dan karakteristik penduduk lainnya.

Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah *satu hari* atau *satu minggu*. Periode referensi satu minggu (yang lalu) paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

Kriteria Satu Jam

Kriteria satu jam digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work* dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya.

Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan pengangguran yang digunakan, di mana pengangguran adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*) sehingga jika batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan maka akan mengubah definisi pengangguran yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total.

Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu input tenaga kerja total berkaitan langsung dengan produksi total. Hal ini diperlukan terutama ketika dilakukan *joint analysis* antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai *employed* (bekerja).

BPS menggunakan konsep/definisi “*bekerja paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu*” untuk mengkategorikan seseorang (*currently economically active population*) sebagai *bekerja*, tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

6. ANGKA PRODUKSITANAMAN PANGAN

Tata cara pengumpulan, pengolahan dan penghitungan produksi tanaman pangan (padi dan palawija) yang digunakan saat ini secara nasional mengacu pada Buku Pedoman Pengumpulan dan Pengolahan Data Tanaman Pangan yang telah disempurnakan oleh Badan Pusat Statistik dan Departemen Pertanian Tahun 2007.

Blok Sensus

Blok sensus adalah satuan wilayah kerja petugas pencacah yang merupakan bagian dari suatu desa/kelurahan, mencakup sekitar 80-120 rumah tangga dan dibatasi oleh batas-batas alam atau batas-batas lainnya yang jelas seperti sungai, tanggul, pantai, rel kereta api dan sebagainya.

Alat Ubinan

Alat Ubinan adalah alat yang digunakan dalam pengukuran produktivitas tanaman pangan (Survei Ubinan), berupa batang dari bahan *stainless steel* berukuran $2\frac{1}{2}$ m x $2\frac{1}{2}$ m. Tanaman padi/palawija yang berada di dalam plot alat ubinan tersebut dipanen, dibersihkan dan selanjutnya ditimbang.

Luas Panen

Luas panen adalah luas tanaman padi/palawija yang dipanen pada suatu wilayah (kecamatan) dalam periode pengumpulan data (bulanan), dan merupakan luas bersih (tidak termasuk luas galangan/pematang).

Data pokok tanaman pangan yang dikumpulkan adalah luas panen dan produktivitas (hasil per hektar) yang selanjutnya digunakan untuk penghitungan produksi. Produksi padi atau palawija merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas (hasil/hektar). Data pendukung lainnya yang juga dikumpulkan antara lain adalah luas puso/rusak, luas tanam dan luas baku lahan sawah.

Pengumpulan Data Luas Tanam/Panen

Pengumpulan data luas panen dilakukan setiap bulan oleh Mantri Pertanian/Kepala Cabang Dinas Kecamatan (KCD) dan dilaporkan dengan formulir Statistik Pertanian (SP). Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan area kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Pengumpulan data luas panen di tingkat kecamatan tersebut didasarkan pada hasil pengumpulan data dari seluruh desa/kelurahan di kecamatan bersangkutan. Pengumpulan data luas tanam/panen pada tingkat desa/kelurahan didasarkan pada:

- a. Sistem blok pengairan.
Untuk yang berpengairan teknis, biasanya sawah dalam desa/kelurahan dibagi dalam blok-blok pengairan, kemudian tanggal penanaman ditentukan untuk setiap blok pengairan, sehingga luas tanaman dapat diperkirakan dari volume air yang disalurkan.
- b. Laporan petani kepada Kepala Desa/Lurah.
Luas tanaman didasarkan atas catatan di desa/kelurahan yang berasal dari laporan petani dan atau kelompok tani/kontak tani.
- c. Banyaknya bibit/benih yang digunakan.
Berdasarkan banyaknya bibit/benih yang digunakan dalam satu desa/kelurahan, petugas dapat menaksir luas tanaman.
- d. *Eye estimate* (pandangan mata)
Penaksiran dengan pandangan mata berdasarkan luas baku lahan dilakukan oleh petugas desa/kelurahan yang sudah berpengalaman di wilayah tugasnya.
- e. Sumber informasi lainnya.
Sumber informasi lain yang dapat digunakan sebagai dasar atau rujukan dalam memperoleh data luas adalah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Petugas Pengawas Benih, dan lain-lain.

Pengumpulan Data Produktivitas

Pengumpulan data produktivitas (hasil per hektar) tanaman pangan dilakukan melalui Survei Ubinan. Periode pengumpulan data dilakukan setiap *subround* (caturwulan/empat bulanan) dengan petugas lapangan adalah Mantri Statistik (Koordinator Statistik Kecamatan)/KSK dan KCD. Metode pengambilan sampel Survei Ubinan dilakukan dalam dua tahap (*two stage sampling*), sebagai berikut:

- a. Tahap I
Memilih sejumlah Blok Sensus secara pps (*proportional probability to size*) dengan *size* banyaknya rumah tangga padi/palawija. Pada Blok Sensus terpilih kemudian

dilakukan pendaftaran (*listing*) rumah tangga untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan kegiatan penanaman padi dan palawija.

b. Tahap II

Berdasarkan hasil *listing* rumah tangga pada tahap I, dipilih sejumlah petak yang akan dipanen pada *subround* tertentu. Pada petak terpilih, kemudian dilakukan pemanenan pada plot pengamatan/plot ubinan berukuran 2½ m x 2½ m.

Penghitungan Produksi

Penghitungan produksi padi dan palawija dilakukan oleh BPS Propinsi menurut *subround* (SR) sesuai dengan periode pengumpulan datanya. Produksi merupakan hasil perkalian antara luas panen dan produktivitas (hasil per hektar).

- a. Produksi SR1 (Januari-April) = Luas Panen SR1 x Produktivitas SR1
- b. Produksi SR2 (Mei-Agustus) = Luas Panen SR2 x Produktivitas SR2
- c. Produksi SR3 (September-Desember) = Luas Panen SR3 x Produktivitas SR3
- d. Produksi Januari-Desember = Produksi (SR1 + SR2 + SR3)
- e. Luas Panen Januari-Desember = Luas Panen (SR1 + SR2 + SR3)
- f. Produktivitas Januari-Desember = Produksi Januari-Desember dibagi Luas Panen Januari-Desember.

Angka Ramalan Produksi

Data/angka yang diperkirakan/diramalkan adalah data luas panen dan produktivitas per provinsi dan per *subround*. Sedangkan data produksi merupakan hasil perkalian antara luas panen dan produktivitas.

a. Ramalan Luas Panen

Model yang digunakan untuk peramalan luas panen per *subround* (Januari-April, Mei-Agustus dan September-Desember) adalah dengan persamaan *regresi linier*, *logaritma*, atau *eksponensial* tergantung pola datanya. Peramalan luas panen suatu *subround* didasarkan pada Luas Tanaman Akhir Bulan (LTAB) di *subround* sebelumnya. LTAB April pada Ramalan I, serta LTAB Agustus pada Ramalan II, juga masih merupakan ramalan.

b. Luas Tanaman Akhir Bulan (LTAB)

Model yang digunakan untuk peramalan luas tanaman akhir bulan April dan Agustus adalah dengan persamaan *trend linier* atau *smoothing eksponensial*, tergantung pola datanya.

c. Ramalan Produktivitas

Model yang digunakan untuk peramalan produktivitas Januari-April, Mei-Agustus dan September-Desember adalah dengan persamaan *trend linier* atau *smoothing eksponensial*, tergantung pola datanya (sama dengan model peramalan luas tanaman akhir bulan).

Secara nasional, penyajian data produksi tanaman pangan hanya sampai tingkat provinsi karena keterbatasan jumlah sampel Survei Ubinan. Tetapi untuk daerah yang melakukan tambahan sampel dengan anggaran Pemerintah Daerah/APBD (ubinan prakarsa), penyajian data dapat dilakukan sampai tingkat kabupaten/kota. Jumlah sampel Survei Ubinan untuk tingkat penyajian provinsi, pada tahun 2009 sebanyak 60.431 plot ubinan, yang terdiri dari ubinan padi 40.802 plot dan ubinan palawija 19.629 plot.

Sebelum data disajikan, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi data di tingkat provinsi dan pusat. Rekonsiliasi tahap awal dilakukan di tingkat provinsi oleh BPS propinsi dan Dinas Pertanian Provinsi terkait Tanaman Pangan bersama dengan BPS Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota terkait Tanaman Pangan. Rekonsiliasi data selanjutnya dilakukan di tingkat pusat oleh BPS dan Departemen Pertanian bersama dengan BPS Propinsi dan Dinas Pertanian Provinsi terkait Tanaman Pangan.

Penyajian data produksi tanaman pangan tahun tertentu dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan status angka yang berbeda, yaitu:

- a. Angka Ramalan I (ARAM I)
ARAM I adalah data produksi pada tahun berjalan dan seluruhnya (Januari-Desember) masih merupakan angka ramalan, disajikan pada awal bulan Maret.
- b. Angka Ramalan II (ARAM II)
ARAM II adalah data produksi tahun berjalan, terdiri dari angka realisasi Januari-April dan angka ramalan Mei-Desember, disajikan pada awal bulan Juli. Setelah ARAM II disajikan, maka ARAM I yang disajikan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- c. Angka Ramalan III (ARAM III)
ARAM III adalah data produksi tahun berjalan, terdiri dari angka realisasi Januari-Agustus dan angka ramalan September-Desember, disajikan pada bulan November. Setelah Aram III disajikan, maka ARAM II yang disajikan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- d. Angka Sementara (ASEM)
ASEM adalah data produksi tahun sebelumnya dan merupakan angka realisasi Januari-Desember, disajikan pada awal bulan Maret tahun berikutnya

Penjelasan Teknis Statistik

(bersamaan dengan penyajian ARAM I). Setelah ASEM disajikan, maka ARAM III tidak digunakan lagi. Karena penghitungan ASEM dilakukan pada awal tahun (bulan Februari), kondisi pemasukan dokumen secara nasional biasanya belum mencapai 100% sehingga data yang disajikan belum final.

e. **Angka Tetap (ATAP)**

ATAP adalah data produksi tahun sebelumnya dan seluruhnya (Januari-Desember) merupakan angka realisasi, disajikan pada awal bulan Juli tahun berikutnya (bersamaan dengan penyajian ARAM II). Setelah ATAP disajikan, maka ASEM tidak digunakan lagi.

Jadwal rilis data produksi tanaman pangan (ARAM, ASEM, ATAP) melalui Berita Resmi Statistik (BRS) adalah seperti berikut:

Status Angka (tahun t)	Jadwal Rilis BRS	Subround		
		Jan-Apr	Mei-Agst	Sep-Des
1. ARAM I	Awal Maret (t)	RAMALAN		
2. ARAM II	Awal Juli (t)	REALISASI	RAMALAN	
3. ARAM III	Awal Nopember (t)	REALISASI		RAMALAN
4. ASEM	Awal Maret (t+1)	REALISASI (angka belum final)		
5. ATAP	Awal Juli (t+1)	REALISASI (angka final)		



Daftar Singkatan dan Akronim



<http://www.bps.go.id>



DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Aram	Angka ramalan
ASEAN	<i>Association of South East Asia Nation</i>
Asem	Angka sementara
Atap	Angka tetap
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BOP	<i>Balance of Payment</i>
BPS	Badan Pusat Statistik
BTBMI	Buku Tarif Bea Masuk Indonesia
c to c	<i>commulative to commulative</i>
CD	<i>Compact Disc</i>
CIF	<i>Cost Insurance Freight</i>
COICOP	<i>Classification of Individual Consumption According to Purpose</i>
CPI	<i>Consumer Price Index</i>
Deptan	Departemen Pertanian
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
FOB	<i>Free on Board</i>
GDP	<i>Gross Domestic Product</i>
GK	Garis Kemiskinan
GKG	Gabah Kering Giling
GKM	Garis Kemiskinan Makanan
GKNM	Garis Kemiskinan Non Makanan
GNP	<i>Gross National Product</i>
HCI	<i>Head Count Index</i>
HS	<i>Harmonized System</i>
IHK	Indeks Harga Konsumen
IHPB	Indeks Harga Perdagangan Besar
ILO	International Labour Organization
I-O	<i>Input-Output</i>
KCD	Kepala Cabang Dinas
KPPBC	Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
KSK	Koordinator Statistik Kecamatan

Daftar Singkatan dan Akronim

LTAB	Luas Tanaman Akhir Bulan
Migas	Minyak dan gas
Nonmigas	Non minyak dan gas
NTB	Nilai Tambah Bruto
PBB	Perserikatan Bangsa-bangsa
PDB	Produk Domestik Bruto
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PEB	Pemberitahuan Ekspor Barang
PIB	Pemberitahuan Impor Barang
PNB	Produk Nasional Bruto
PPL	Penyuluh Pertanian Lapangan
PPLS	Pendataan Program Perlindungan Sosial
ppp	<i>purchasing power parity</i>
pps	<i>proportional probability to size</i>
PSE05	Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005
q to q	<i>quarter to quarter</i>
RTS	Rumah Tangga Sasaran
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SBH	Survei Biaya Hidup
SD	Sekolah Dasar
SITC	<i>System of International Trade Classification</i>
SLTA	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SNA	<i>System of National Accounts</i>
SP	Sensus Penduduk
SPKKD	Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar
SR	<i>Subround</i>
Supas	Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
UNDP	United Nation Development Program
UNSD	<i>United Nations Statistical Division</i>
WCO	World Customs Organization
y on y	<i>year on year</i>